

**PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI DALAM
MENDAPATKAN PENGAKUAN SERTIFIKAT VAKSIN
COVID-19 OLEH UNI EROPA TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**OLEH:
FAUZEIN BHIMANTARA YUDHA
NIM I02216009**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauzein Bhimantara Yudha

NIM : I02216009

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Peran Kementerian Luar Negeri RI dalam Mendapatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Uni Eropa**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya ,30 Desember 2022



Yang Menyatakan

Fauzein Bhimantara Yudha

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fauzein Bhimantara Yudha

NIM : I02216009

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **“Peran Kementerian Luar Negeri RI dalam Mendapatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Uni Eropa”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya 30 Desember 2022

Pembimbing



Rizki Rahmadini Nurika S.Hub.Int, M.A.
NIP. 199003252018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Fauzein Bhimantara Yudha dengan judul: "Peran Kementerian Luar Negeri RI dalam Mendapatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Uni Eropa" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 2 Januari 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A
NIP 199003252018012001

Penguji II



Moh. Fathoni Hakim, M.Si
NIP 198401052011011000

Penguji III



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos.,
M.Si
NIP 197607182008012000

Penguji IV



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP 196909071994032000

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial



Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag.
197300272000031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauzein Bhimantara Yudha
 NIM : 102216009
 Fakultas/Jurusan : Fisip / Hubungan Internasional
 E-mail address : fauzeinbhimanta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran Kementerian Luar Negeri RI Dalam Mendapatkan Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Vaksin Covid – 19 Oleh Uni Eropa


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Penulis


 (Fauzein Bhimantara Yudha)

ABSTRACT

Fauzein Bhimantara Yudha, 2022. *The Role of the Ministry of Foreign Affairs in Obtaining Recognition of the Covid-19 Vaccine Certificate by the European Union 2021. Thesis of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya*

Keywords: *the Ministry of Foreign Affairs, Equality, Covid-19 Vaccine Certificate, European Union*

Recognition of the Equality of the Covid-19 vaccine certificate by the European Union is something that is needed by Indonesia to open access to the mobility of Indonesian citizens in the EU. The Indonesian Ministry of Foreign Affairs is also intensively conducting mutual recognition agreements or MRAs for vaccination certificates with a number of partner countries, one of which is the European Union. This research describes the role of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs in obtaining commission implementing decision 2022/726 on 11 May 2022 regarding the recognition of the co-19 vaccine certificate by the European Union. Using a descriptive qualitative approach. The data collection methods used included interviews, documentation, and online data tracking. This achievement is inseparable from the role of the Ministry of Foreign Affairs based on data in the field. Researchers get two roles of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, including: (1) as a coordinator from the Indonesian side and (2) as a facilitator.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Fauzein Bhimantara Yudha, 2022. *Peran Kementerian Luar Negeri RI dalam Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Vaksin Covid-19 oleh Uni Eropa Tahun 2021.* Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci: Kementerian Luar Negeri RI, Kesetaraan, Sertifikat Vaksin Covid-19, Uni Eropa

Pengakuan Kesetaraan sertifikat vaksin Covid-19 oleh Uni Eropa merupakan suatu hal yang di butuhkan oleh Indonesia untuk membuka akses mobilitas WNI di UE. Kementerian Luar Negeri RI juga gencar dalam melakukan saling pengakuan atau mutual recognition agreement atau MRA atas sertifikat vaksinasi dengan sejumlah negara mitra salah satunya Uni Eropa. Penelitian ini menggambarkan peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan commission implementing decision 2022/726 pada tanggal 11 Mei 2022 tentang pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengambilan data yang digunakan antara lain wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online, capaian ini tidak terlepas dari peran kemenlu berdasarkan data di lapangan. Peneliti mendapatkan dua peran Kementerian Luar Negeri RI, antara lain: (1) sebagai koordinator dari pihak Indonesia dan (2) sebagai fasilitator.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

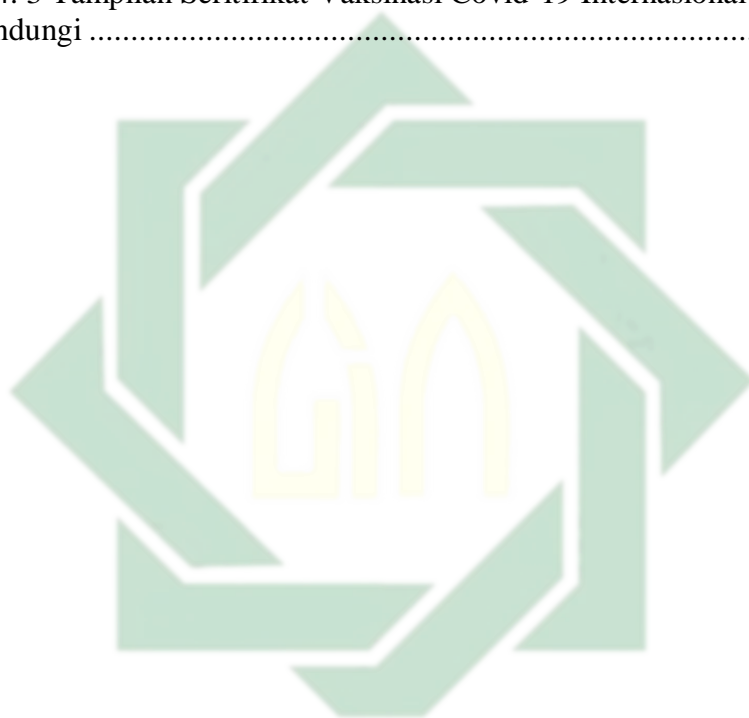
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	v
PERSTUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Argumentasi Utama.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	17
A. Peran.....	17
B. Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia oleh Uni Eropa.....	21
C. Kementerian Luar Negeri RI	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu	30
C. Tingkat Analisis Data.....	31
D. Tahap – Tahap Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33

F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Teknik Validasi Data.....	36
BAB IV	38
PEMBAHASAN.....	38
A. Sertifikat Vaksin Covid-19 di Indonesia	38
B. Sertifikat Vaksin Covid-19 di Uni Eropa	42
C. Tujuan Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Vaksinasi Covid-19	54
D. Aplikasi PeduliLindungi dari Indonesia Sesuai Standar DIVOC	61
E. Perlindungan pada Data Pengguna Aplikasi PeduliLindungi dan EUDCC68	
F. Kementerian Luar Negeri RI sebagai Koordinator dari Pihak Indonesia ..	71
G. Kementerian Luar Negeri RI sebagai Fasilitator	73
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Komponen Model Interaktif Analisis Data Kualitatif.....	35
Gambar 4. 1 Aplikasi EU Digital COVID Certificate/EUDCC.....	44
Gambar 4. 2 Tampilan Aplikasi PeduliLindungi.....	60
Gambar 4. 3 Tampilan Serifikat Vaksinasi Covid-19 Internasional di PeduliLindungi	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kunjungan wisatawan mancanegara beberapa negara Uni Eropa pada bulan Mei hingga September Tahun 2022.....	60
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewabahnya virus Covid-19 sejak tahun 2019 telah terdeteksi oleh WHO (World Health Organization) di Wuhan. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan mulai masuk ke negara Indonesia pada 2 Maret 2020. Beberapa sektor industri pariwisata dan sektor lainnya mengalami kerugian. Dalam hal ini pemerintah menutup semua kegiatan besar di luar ruangan untuk menghindari dampak dari pandemi. Segala bentuk bepergian telah diwajibkan untuk mematuhi protokol yakni 3M (Memakai Masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak) untuk mencegah penyebaran Covid-19.¹

Selain dengan melakukan protokol kesehatan, cara lain yang dapat dilakukan untuk menurunkan kasus terinfeksi virus Covid-19 pemerintah melakukan vaksinasi sebagai bentuk perlindungan khusus dalam rangka menahan arus Covid-19. Setiap warga negara yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama atau kedua akan mendapatkan sertifikat vaksin yang berfungsi sebagai tanda maupun status bahwa orang tersebut telah benar – benar melakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama atau kedua. Sertifikat vaksin dibuat dan dikeluarkan oleh unit pemerintah yang bertugas dalam pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Sistem pendataan sertifikat vaksin berupa informasi satu data yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) para peserta vaksin dan kemudian sertifikat vaksin akan dikirimkan melalui pesan singkat sesuai

¹ Sarmigi, Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci, *Jurnal Al – Dzahab* Th 2020, Vol. 1, 3.

dengan nomor telepon yang dicantumkan oleh penerima vaksin, sertifikat ini dapat dicetak oleh penerima vaksin secara pribadi melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk memudahkan pelayanan masyarakat.

Menteri Luar Negeri RI bu Retno Marsudi mengatakan bahwa pada tahun 2022 “Diplomasi Kesehatan” menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pada era pandemi Covid-19 memberikan pelajaran untuk dapat memperbaiki ketahanan kesehatan baik dalam ranah nasional maupun global. Kerjasama jangka panjang dilakukan guna memperkuat infrastruktur kesehatan serta industri kesehatan.² Percepatan pengakuan sertifikat vaksin menjadi salah rangkaian diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia. Menurut Lintang Paramitasari selaku Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) bahwa Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka pembentukan saling pengakuan atau *mutual recognition agreement* atau MRA atas sertifikat vaksinasi dengan sejumlah negara mitra.³ Penerapan MRA di suatu kawasan regional dapat membantu menyelesaikan permasalahan negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara melalui kerjasama. Melalui MRA suatu negara akan mendapatkan pelayanan atau *service*, sumber daya manusia dari suatu negara yang sudah memenuhi standar,

² “Dari Indonesia untuk Dunia, Diplomasi Keadilan Vaksin hingga Pemulihan Ekonomi,” *Indonesia.Go.id*, Januari 6, 2022, diakses pada 7 Januari 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3590/dari-indonesia-untuk-dunia-diplomasi-keadilan-vaksin-hingga-pemulihan-ekonomi>

³ Apriandi, “Kemlu Tingkatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Negara Mitra,” *Koransn.com*, April 7, 2022, diakses pada 7 Januari 2023, <https://koransn.com/kemlu-tingkatkan-pengakuan-sertifikat-vaksin-covid-19-di-negara-mitra/>

maupun pelayanan pengadaan barang.⁴ Menurut Lintang pengembangan MRA adalah suatu langkah untuk memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri dalam rangka pemulihan ekonomi, bagi wisatawan, pekerja migran Indonesia, dan pelaku bisnis. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong *Universal Verifier Vaccine Certificate* agar sertifikat digital vaksin Covid-19 dapat terbaca dalam sistem negara lain, langkah ini dilakukan agar perjalanan lalu lintas batas negara lebih aman. Dalam hal ini Indonesia tengah mendorong *Universal Verifier Vaccine Certificate* dengan Uni Eropa, Singapura dan India.⁵

Uni Eropa mengakui sertifikat vaksin Covid-19 yang diterbitkan oleh Indonesia melalui aplikasi PeduliLindungi di wilayahnya per 11 Mei 2022. Pengakuan ini ditandai dengan adanya *commission implementing decision 2022/726* menyebutkan bahwa pengakuan kesetaraan atas sertifikat yang dikeluarkan oleh Indonesia. Melalui hal ini, pembacaan terhadap QR code pada aplikasi Peduli Lindungi dapat terbaca di 27 negara anggota uni Eropa. Sehingga orang – orang Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Uni Eropa tidak perlu lagi mendaftarkan QR codenya.⁶

Melalui aplikasi PeduliLindungi dan EU Digital Covid, Indonesia dan Uni Eropa resmi terjalin kerjasama dan saling mengakui melalui sertifikat vaksinasi

⁴ “Recognition Arrangement, Tantangan Sekaligus Peluang Bagi Indonesia,” *UNPAD*, Maret 17, 2016, diakses pada 7 Januari 2022, <https://www.unpad.ac.id/2016/03/mutual-recognition-arrangement-tantangan-sekaligus-peluang-bagi-indonesia/>

⁵ Fergi Nadira, “Upaya Pemerintah Saling Akui Sertifikat Vaksin dengan Negara Lain,” *Republika.co.id*, April 7, 2022, diakses pada 7 Januari 2023, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r9yq4m370>

⁶ Suci Sekarwat, “PeduliLindungi Diakui Eropa, Duta Besar Andri: Ini Bukti Penguatan Kerja Sama,” *Tempo.co*, May 13, 2022, diakses pada 10 Juli 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1591138/pedulilindungi-diakui-eropa-duta-besar-andri-ini-bukti-penguatan-kerja-sama>

covid-19. Dengan adanya saling pengakuan ini, akan memudahkan bagi para pelaku perjalanan luar negeri, baik itu pekerja migran Indonesia, wisatawan mancanegara, pelajar dan bisnis, untuk seandainya mereka akan pergi dari Indonesia ke EU atau warga EU untuk masuk ke Indonesia. Kerja sama ini secara otomatis melibatkan 27 negara anggota Uni Eropa, yakni Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Prancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.

Adapun peran dari aplikasi Peduli Lindungi yaitu untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses fasilitas umum. Fitur scan QR yang digunakan untuk akses ini memudahkan masyarakat tanpa perlu membawa surat kesehatan kemana saja. Begitupun dengan aplikasi ini yang sudah memiliki data vaksin kita sehingga tidak perlu membawa bentuk file dari sertifikat vaksin. Fitur baru telah ditambahkan pada aplikasi Peduli Lindungi yang bertujuan memudahkan warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat memperoleh kartu vaksinasi non-indonesia. sebagaimana yang diungkapkan oleh Chief Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji bahwa Kementerian Kesehatan akan memperkenalkan bagaimana para WNI, terus kemudian juga nanti itu WNA bisa mengakses PeduliLindungi walaupun sertifikat vaksinnya bukan diperoleh di Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah dalam verifikasi vaksin bagi WNI maupun WNA yang telah tervaksinasi di luar negeri. WNI maupun WNA dapat melakukan pendaftaran di vaksinln.dto.kemkes.go.id kemudian nanti akan diverifikasi. Hal yang diharapkan dari keberadaan fitur

aplikasi Peduli Lindungi adalah dapat mengakses fasilitas publik. Dengan fitur ini juga mereka bisa memastikan pergerakan yang terjadi di Indonesia terjaga secara protokol kesehatan maupun skrining dan lainnya.⁷

Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi melalui KBRI Brussels, Belgia, dan kartu vaksinasi dari Indonesia juga diakui oleh Uni Eropa. Uni Eropa menunjukkan bukti vaksinasi dengan EU Digital Covid Certificate (EU DCC). Sementara itu, Indonesia mengakses data vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi. Saat ini Indonesia dan UE telah saling mengakui sertifikat tersebut.

Dalam upaya interoperabilitas antara Indonesia dan Uni Eropa pada sertifikat vaksinasi Covid-19, dapat diketahui bahwa Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan RI telah melalui proses pengawalan penyertaan teknis dan aspek legalitasnya yang cukup panjang dengan Komisi Sertifikat Digital Covid Uni Eropa. Andri Hadi selaku Duta Besar RI Belgia, Luksemburg mengatakan bahwa saling pengakuan ini merupakan suatu bentuk nyata penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dan memperlihatkan betapa pentingnya posisi Indonesia bagi Uni Eropa.⁸ Keputusan adanya saling pengakuan kesetaraan terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 ini menurut Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah

⁷ "PeduliLindungi Dapat Digunakan Pemegang Kartu Vaksin Luar Negeri," *KOMINFO*, September 14, 2021, diakses pada 7 Januari 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36952/pedulilindungi-dapat-digunakan-pemegang-kartu-vaksin-luar-negeri/0/berita>

⁸ "Uni Eropa Sahkan PeduliLindungi, Bisa Dipakai di 27 Negara," *CNN Indonesia*, May 12, 2022, diakses pada 7 Januari 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/internasional/20220512142316-134-795961/uni-eropa-sahkan-pedulilindungi-bisa-dipakai-di-27-negara/amp>

sebuah langkah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.⁹ Berangkat dari uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Peran Kementerian Luar Negeri RI Dalam Mendapatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Uni Eropa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana Peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa tahun 2021 ?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi untuk menjadi sebuah bahan acuan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah setelahnya akan membahas mengenai peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa.

2. Secara Praktis

⁹ “Perjalanan Jadi Gampang, Uni Eropa Akui Peduli Lindungi karena Pertimbangan Ini,” *Warta Ekonomi, co.id*, May 13, 2022, diakses pada 7 Januari 2023, <https://www.google.com/amp/s/wartaekonomi.co.id/amp/read413721/perjalanan-jadi-gampang-uni-eropa-akui-pedulilindungi-karena-pertimbangan-ini>

Secara praktis diharapkan riset ini dapat memberikan informasi baru dan referensi kepada pemerintah terhadap penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

E. Tinjauan Pustaka

1. “Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM” oleh Dian Herdiana tahun 2021.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Aplikasi PeduliLindungi memiliki tiga tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat saat mengakses fasilitas umum, pelacakan orang yang dinyatakan terpapar Covid-19, dan deteksi paparan Covid-19. Diindikasikan untuk tujuan informasi untuk pemetaan klasifikasi zona Covid-19. Isu yang muncul antara lain keamanan data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi dan hak masyarakat yang tidak memiliki perangkat elektronik untuk mengakses fasilitas umum.¹⁰

Penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya dengan jenis penelitian kualitatif pendekatan kajian pustakan. Sedangkan perbedaan dengan apa yang diteliti terdapat pada fokus pembahasan peneliti membahas bagaimana peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa.

2. “Keberhasilan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Kebijakan Percepatan Vaksinasi dan Akses Pelayanan Publik Di Indonesia” oleh Aridyah

¹⁰ Dian Herdiana, “Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM”, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.6 Nopember 2021, 1685

Fastyaningsih, Dian Priyantika, Fitta Tri Widyastuti, Kismartini Kismartini, Augustin Rina Herawat tahun 2021

Penelitian ini untuk mengetahui manfaat besar dari aplikasi PeduliLindungi terhadap percepatan vaksinasi dan akses pelayanan publik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi PeduliLindungi efektif untuk mendukung kebijakan percepatan vaksinasi, meskipun terdapat pro kontra dan beberapa kecurangan dalam pelaksanaannya.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terdapat pada metode penelitiannya dengan jenis penelitian kualitatif, selain itu landasan konsepnya juga memaparkan tentang aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan perbedaan dengan apa yang diteliti terdapat pada fokus pembahasan dimana peneliti membahas bagaimana peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa.¹¹

3. “Implementasi Aplikasi PeduliLindungi Untuk Menunjang Aktifitas Sosial Kemasyarakatan” oleh Ishak Kholil1, Laela Kurniawatih, Nicodias Palasara, Ridan Nurfalah dan Ani Oktarini Sari 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi anggota majlis ta’lim. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para peserta ibu-ibu Majelis Ta’lim Ibnu Salam akan

¹¹ Aridyah Fastyaningsih, Dian Priyantika, Fitta Tri Widyastuti, Kismartini, “Keberhasilan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Kebijakan Percepatan Vaksinasi dan Akses Pelayanan Publik Di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol 6, Nomor 2, Oktober 2021, 95.

dapat mendaftar dan mengetahui cara menggunakan fitur yang ada pada aplikasi PeduliLindungi dengan baik dan benar.¹²

Sedangkan perbedaan dengan apa yang diteliti terdapat pada fokus pembahasanpeneliti membahas peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa.

4. Penelitian dengan judul *COVID-19 Certificates as a New Form of Mobility Control*, yang ditulis oleh Jouni Häkli. Dipublikasikan dalam *European Journal of Risk Regulation*, pada tahun 2021.

Pada jurnal ini dijelaskan bahwa kondisi Covid-19 memunculkan sertiifikat Covid-19 sebagai salah satu syarat untuk para pelancong saat melakukan perjalanan. Penulis dalam penelitian ini menyamakan paspor dengan sertifikat Covid-19 keduanya sebagai alat dalam rezim mobilitas. Bahkan sertifikat vaksinasi seperti Sertifikat Digital Eropa dianggap sebagai cara yang adil dan demokratis untuk membuka kembali perjalanan internasional agar mobilitas dilakukan secara merata. Sertifikat Digital UE dengan kode QR mengurangi peran penjaga perbatasan karena menggunakan kode QR. Dijelaskan juga bahwa pendorong pertumbuhan mobilitas internasional yaitu migrasi tenaga kerja, perjalanan bisnis dan rekreasi, serta perpindahan untuk mencari suaka atau tempat untuk pengungsian.¹³

¹²Ishak Kholil, Laela Kurniawatih, Nicodias Palasara, Ridan Nurfalalah dan Ani Oktarini Sari, “Implementasi Aplikasi PeduliLindungi Untuk Menunjang Aktifitas Sosial Kemasyarakatan”, *Jurnal Abdimas*, Vol 1 No. 1 Februari 2022.

¹³ Jouni Häkli, “COVID-19 Certificates as a New Form of Mobility Control,” *European Journal of Risk Regulation* 12 Issue 2 (2021): 362-369, doi: <https://doi.org/10.1017/err.2021.21>

Persamaan jurnal Jouni Hakli dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan sertifikat digital Covid-19 baik dari Indonesia (PeduliLindungi) dan Uni Eropa (EUDCC) dijadikan sebagai salah satu syarat dan alat yang digunakan wisatawan dalam melakukan perjalanan baik dalam maupun ke luar negeri yang melewati batas-batas negara. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana jurnal Jouni Hakli fokus menjelaskan kesamaan antara paspor dengan sertifikat Covid-19 sebagai alat pada rezim mobilitas, sementara penulis akan menjelaskan pengakuan kesetaraan sertifikat Covid-19 yang menjadikan perjalanan atau mobilitas para wisatawan pada kondisi Covid-19 lebih bebas, aman, dan mudah.

5. Penelitian dengan judul *Does the EU COVID Digital Certificate Strike Reasonable Balance between Mobility Needs and Public Health?* ditulis oleh Gianluca Montanari Vergallo. Dipublikasikan dalam *Journal Medicina*, pada tahun 2021.

Pada jurnal ini dijelaskan tentang Sertifikat Digital Covid-19 Uni Eropa mulai dari kegunaan, sistem kerja, hingga karakteristik dari sertifikat tersebut. Sertifikat Digital Covid-19 memberikan hak bebas bergerak yang sama bagi semua pihak. Selain itu Sertifikat Digital Covid-19 membuat industri pariwisata hingga lalu lintas penerbangan bangkit kembali. Sertifikat ini memungkinkan perjalanan nasional dan luar negeri tetapi tetap patuh terhadap syarat yang diberlakukan di negara tujuan. Pada penelitian juga dijelaskan bahwa Sertifikat Digital Covid akan

menimbulkan deskriminasi dan ketimpangan pada kondisi pembagian dosis vaksin yang tidak merata disejumlah populasi yang ada.¹⁴

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada pembahasan penelitian, dimana kedua penelitian menjelaskan karakteristik, kegunaan, pengertian, hingga manfaat dari Sertifikat Digital Covid-19 Uni Eropa. Sedangkan perbedaannya terletak topik dan subjek penelitian. Jika penulis mengambil topik peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa dengan subjek Kementerian Luar Negeri RI. Sementara penelitian Gianluca Montanari Vergallo mengangkat topik Sertifikat Digital Covid Uni Eropa dalam mencapai keseimbangan pada mobilitas dan kesehatan masyarakat, Sertifikat Digital Covid Uni Eropa.

6. Penelitian dengan judul *Introduction of the EU Digital COVID Certificate in Slovenia: Technological and Process Aspects* yang ditulis oleh Dalibor Stanimirovic dan Lucija Tepej Jovic. Dipublikasikan dalam *Informatics and Technology in Clinical Care and Public Health*, pada tahun 2022.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Slovenia berhasil meengenalkan EUDCC sebelum 1 Juli 2022. Sistem EUDCC di Slovenia *National Institute of Kesehatan Masyarakat (Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje (NJIZ)*, lembaga ini juga menjadi penerbit EUDCC resmi di tingkat negara Slovenia. Peneliti menjelaskan EUDCC diakui di semua negara Anggota UE dalam penghapusan pembatasan perjalanan, dimana semua warga negara UE maupun warga negara ketiga yang tinggal di UE

¹⁴ Gianluca Montanari Vergallo dkk., “Does the EU COVID Digital Certificate Strike a Reasonable Balance between Mobility Needs and Public Health?,” *Medicina* 57 (10), 1077 (2021): 1-9, doi: <https://doi.org/10.3390/medicina57101077>

diberikan kebebasan untuk melakukan perjalanan di semua negara Anggota UE. Pembentukan konsensus politik dan pembangunan platform digital pusat di tingkat Uni Eropa terdefiniskan dengan baik ke semua negara Anggota UE. Peneliti menjelaskan semua proyek UE dapat berjalan lancar apabila infrastruktur nasional dapat berkembang dengan baik, aturan yang tepat dalam memproses data, jumlah ahli kompeten yang memadai, arsitektur nasional yang sesuai database digital kesehatan dan solusi, serta hukum yang sesuai kerangka.¹⁵

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Dalibor Stanimirovic terletak pada variabel penelitian yaitu mendeskripsikan sistem Sertifikat Digital Covid Uni Eropa atau EUDCC. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Jika jurnal yang ditulis oleh Dalibor Stanimirovic berfokus pada Sertifikat Digital Covid Uni Eropa di Slovenia. Sementara penulis menjelaskan implementasi kesetaraan pengakuan sertifikat vaksinasi Covid-19 antara Indonesia dengan Uni Eropa.

7. Penelitian dengan judul *Diplomasi Kesehatan Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Vaksin Covid-19* yang ditulis oleh Syafrina Amelia Putri. Dipublikasikan dalam repository skripsi Universitas Sriwijaya pada tahun 2022.

Penelitian ini menjelaskan tentang kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan ini untuk menjadikan sebuah basis penyelamatan warga negara maupun penyelamatan krisis kesehatan serta krisis ekonomi yang melalui PT. Kalbe Farma

¹⁵ Dalibor Stanimirovic dan Lucija Tepej Jovic, "Introduction of the EU Digital COVID Certificate in Slovenia: Technological and Process Aspects," *Informatics and Technology in Clinical Care and Public Health* 289 (2022): 118-122, <https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI210873>

(Tbk) dari Indonesia dengan Genexine.Inc dari Korea Selatan. Diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan sebagai respon terhadap dinamika kesehatan global yang mementingkan kepentingan nasional dalam masalah kesehatan nasional. Adanya kerjasama entitas swasta ini sebagai upaya untuk penanggulangan Covid-19.¹⁶

Penelitian ini dijadikan sumber referensi penulis karena pada saat pandemi Covid-19 baik Indonesia maupun negara luar akan membutuhkan kerjasama diplomasi kesehatan untuk mencapai kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya. Perbedaan dalam antara skripsi yang ditulis oleh Syafrina dengan peneliti ini terletak pada subjek penelitian. Dimana jika Syafrina meneliti kerjasama yang dilakukan oleh entitas swasta yaitu perusahaan obat. Sementara peneliti melakukan penelitian pada subjek pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri yang nantinya akan bekerjasama dengan pihak Uni Eropa dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksinasi Covid-19.

8. Penelitian dengan judul *Tujuan Diplomasi Kesehatan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus dalam Diplomasi Bilateral Indonesia dengan Fiji dan Kepulauan Solomon* yang ditulis oleh Anastasia Cattleya Limantara dkk. Dipublikasikan dalam Journal UNPAR pada tahun 2021.

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai tujuan Indonesia bekerjasama secara bilateral dengan Fiji dan Kepulauan Solomon dalam bidang diplomasi kesehatan. Tujuan Indonesia antara lain, meningkatkan citra positif Indonesia dalam

¹⁶ Syafrina Amelia Putri, "diplomasi kesehatan indonesia-korea selatan dalam pengembangan vaksin covid-19," (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/74317>

komunitas internasional, meningkatkan solidaritas, sektor kemanusiaan, dan perkonomian. Bantuan dari Indonesia dilakukan untuk kepentingan ekonomi berupa kerja sama ekspor dalam bidang pengadaan alat kesehatan yang sedang didorong oleh Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia berupaya untuk melebarkan sayap pengaruhnya ke benua Oseania.¹⁷ Penelitian ini dijadikan referensi oleh penulis karena disaat terjadi pandemi global negara-negara harus saling memperkuat kerjasama di aspek kesehatan demi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Persamaan penelitian Anastasia Cattleya Limantara dengan peneliti yaitu kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara luar pada saat pandemi Covid-19 dibalik kerjasama bilateral ini terdapat kepentingan nasional dari masing-masing negara. Perbedaannya terletak pada topik penelitian jika penelitian Anastasia yaitu kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Kepulauan Solomon dan Fiji dalam melakukan diplomasi kesehatan. Sementara penelitian ini akan menjelaskan peran dari Kementerian Luar Negeri RI dalam melakukan kerjasama bilateral dengan Uni Eropa untuk mendapatkan pengakuan sertifikat vaksinasi Covid-19

F. Argumentasi Utama

Berdasarkan latar belakang dan studi litelatur, peneliti menduga bahwa Peran Kementerian RI dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan Covid 19 oleh Uni Eropa ini adalah pertama sebagai lembaga yang menghubungkan perwakilan dari

¹⁷ Anastasia Cattleya Limantara, dkk., "Tujuan Diplomasi Kesehatan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus dalam Diplomasi Bilateral Indonesia dengan Fiji dan Kepulauan Solomon," *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi* (2010), 141-157, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5194>

Indonesia dengan pihak Uni Eropa yaitu Komisi Uni Eropa. Kedua Kementerian Luar Negeri RI sebagai lembaga yang membantu percepatan *mutual recognition agrrement* atau MRA pada sertifikat vaksinasi Covid-19 antara negara Indonesia dengan negara mitranya salah satunya yaitu negara Uni Eropa.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh subbab pendahuluan yaitu: a) Latar Belakang Masalah; b) Rumusan Masalah; c) Tujuan Penelitian; d) Manfaat Penelitian; e) Tinjauan Pustaka; f) Argumentasi Utama; g) Sistematika Pembahasan.

BAB II KERANGKA KONSEP

Kajian Teori ini akan mengulas konsep a) Peran; b) Kemenlu dan c) Pengakuan

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini akan dipaparkan metode yang ditempu peneliti dalam melakukan penelitian, berisi tentang; a) Tahap-tahap Penelitian; b) Lokasi Penelitian; c) Teknik Pengujian Keabsahan Data dan d) Fungsi Teori Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Pembahasan dan analisis data secara menyeluruh mengenai peran Kementerian Luar Negeri RI dalam mendapatkan pengakuan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa dalam suatu hubungan diplomatik suatu negara dengan menggunakan analisis kerangka konseptual yang telah disediakan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Di bagian akhir laporan penelitian ini, uraian tentang hasil pengumpulan data yang diperoleh dirangkum dan disajikan dalam bahasa yang sederhana dengan saran-saran yang membangun.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah sebuah aspek dinamis kedudukan atau status yang jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang telah menjalankan suatu peranan.¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan peran adalah tukang lawak, pemain sandiwara, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang dalam suatu kedudukan di masyarakat.¹⁹ Menurut Riyadi peran memiliki pengertian konsep serta orientasi yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Individu atau organisasi berperan atau berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan lingkungan atau orang lain. Peran diartikan sebagai suatu tuntutan yang diberikan secara struktural seperti tanggung jawab, norma, harapan, dan lain sebagainya. Peran adalah rangkaian perilaku dalam suatu kelompok kecil maupun besar.²⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat tiga hal penting yang ada di dalam peran²¹, antara lain:

- a. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

¹⁹ "Pengertian Peran," *KBBI*, diakses pada 7 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/peran.html>

²⁰ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 138.

²¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, 243.

- b. Peran digambarkan sebagai perilaku individu yang penting di dalam struktur masyarakat
- c. Peran merupakan norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini peran digunakan sebagai aturan yang membimbing seseorang di tengah masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga pembagian peran,²² antara lain :

- a. Peran aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok tersebut sebagai aktifitas kelompok. Misalnya pengurus kelompok, pejabat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain mempunyai kedudukan yang berpengaruh di dalam suatu kelompok.
- b. Peran partisipatif, yaitu peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompoknya karena memberikan sumbangan yang berguna bagi kelompok. Dengan kata lain kedudukannya memberikan kontribusi kepada kelompok.
- c. Peran pasif, yaitu sumbangan dari anggota kelompok yang bersifat pasif, anggota kelompok menahan diri dan memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan baik.

Ada lima dimensi peran menurut Arimbi, Horoepoetri, dan Santosa,²³ antara lain:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, peran adalah suatu kebijaksanaan yang baik dan tepat untuk dilaksanakan

²² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 242.

²³ Arimbi, Horoepoetri, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003)

- b. Peran sebagai alat komunikasi, peran dapat dimanfaatkan sebagai alat atau instrumen agar mendapatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Presepsi peran sebagai alat komunikasi dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, pandangan dan pendapat dari masyarakat digunakan sebagai masukan untuk membentuk keputusan atau kebijakan yang responsibel dan responsif.
- c. Peran sebagai terapi, peran dilakukan sebagai upaya masalah -masalah psikologis dari masyarakat seperti tidak percaya diri, diri mereka tidak menjadi sebuah komponen penting dalam masyarakat, dan perasaan ketidakberdayaan
- d. Peran sebagai strategi, peran merupakan strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat atau *public supports*.
- e. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran dimanfaatkan untuk meredam atau mengurangi konflik dengan pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Bertukar pikiran serta pendapat dapat meningkatkan toleransi dan rasa saling pengertian. Sehingga mengurangi rasa ketidakpercayaan.
- f. Peran sebagai coordinator, peran sebagai coordinator di lakukan untuk menjadi alat sebagai negosiasi kerja sama suatu negara dan menjadi penengah apa yang di dapatkan di sampaikan kepada kedua belah pihak yang sedang melakukan kerja sama. Koordinator sendiri menurut pearce II dan Robinson adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama, sedangkan menurut stoner koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang

terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Adapun ciri – ciri dari koordinasi yaitu Yang pertama adalah tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena telah melakukan koordinasi dengan baik. Yang kedua adalah koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Lalu koordinasi adalah proses kerja yang terus-menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok untuk tujuan bersama dan didukung oleh adanya konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan manusia/kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja. dapat disimpulkan bahwa yang merupakan ciri-ciri koordinasi adalah suatu usaha

kerjasama yang dilakukan secara terus-menerus yang didukung adanya kesatuan usaha atau tindakan yang ditanggungjawab oleh pimpinan.

- g. Peran sebagai fasilitator adalah pemandu proses, menurut Hunter et al fasilitator merupakan bentuk memfasilitasi seseorang untuk mempermudah semua pekerjaan yang sulit menjadi mudah, fasilitator juga mempermudah proses menjadi lebih baik dalam pengerjaan sesuatu. Tugas fasilitator hanyalah pemimpin proses dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau memberikan kontribusi terhadap substansi diskusi.

Dalam penelitian berjudul **“Peran Kementerian Luar Negeri RI dalam Mendapatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Uni Eropa”**, peneliti akan menggunakan konsep peran menurut Soerjono Soekanto sebagai alat untuk menganalisis.

B. Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia oleh Uni Eropa

Pada tanggal 1 Juli 2021 Uni Eropa memberlakukan peraturan sertifikat digital Covid orang-orang dapat menerbitkan dan verifikasi sertifikat digital Covid di seluruh wilayah Uni Eropa. Pada tanggal 20 Agustus 2021 Makedonia Utara, Turki, dan Ukraina bergabung dengan sistem EUDCC, negara-negara non-Uni Eropa secara bertahap mulai mengadopsi kesetaraan vaksinasi Covid-19 oleh Uni Eropa.²⁴ Jika Uni Eropa membuka sertifikat digital Covid-19 untuk negara-negara non-UE melalui

²⁴ “EU COVID Certificate: the global vaccine passport,” *Covid Passport*, diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.covidpasscertificate.com/europe-digital-green-pass/>

keputusan kesetaraan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa, maka akan membuat sertifikat yang dikeluarkan oleh negara tersebut langsung diterima oleh Uni Eropa dan membuat kondisi sertifikat vaksinasi Covid-19 dari negara non-UE dianggap sama dengan EUDCC.²⁵ Kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19 adalah suatu bukti dalam bentuk digital atau diatas kertas yang dimiliki pelancong non-Uni Eropa saat akan memasuki wilayah Uni Eropa digunakan untuk membuktikan bahwa orang tersebut telah divaksinasi Covid-19 atau dinyatakan sembuh dari Covid-19 atau negatif. Komisi Eropa menyebutnya “*Digital Green Certificate.*” Keputusan kesetaraan yang diberikan oleh Uni Eropa digunakan untuk berbagi data pengguna melalui sistem agar wisatawan yang masuk ke Uni Eropa menggunakan sertifikat internasional dapat terbaca dan tervalidasi oleh sistem vaksinasi Covid-19 milik Uni Eropa yaitu EUDCC.

26

Kesetaraan memungkinkan untuk validitas, verifikasi keaslian sertifikat vaksinasi Covid-19 yang dimiliki pengguna non-UE dan integritas sistem. Lintang Paramita selaku Sekretaris Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri RI dalam konferensi pers di gedung Kementerian Luar Negeri pada tanggal 12 Mei 2022 mengatakan bahwa dengan adanya saling pengakuan pada sertifikat vaksinas, perjalanan ke Uni Eropa lebih mudah begitupun sebaliknya

²⁵ “Non-EU countries welcome to join the EU Digital COVID certificate system,” *European Union External Action*, October 27, 2021, https://www.eeas.europa.eu/eeas/non-eu-countries-welcome-join-eu-digital-covid-certificate-system_en

²⁶ “Covid Travel certificate in EU: All you need to know,” *The Times of India*, June 2, 2021, diakses pada 5 Desember 2022, https://www.google.com/amp/s/m.timesofindia.com/world/europe/covid-travel-certificate-in-eu-all-you-need-to-know/amp_articles/83168478.cms

wisatawan Uni Eropa yang berkunjung ke 40 Negara non-UE yang tergabung dalam pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi. Dalam pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi ini contohnya wisatawan dari Indonesia hanya perlu aplikasi PeduliLindungi dan kode QR ke otoritas Uni Eropa, mereka langsung bisa membacanya.²⁷ Didier Reynders selaku *the European Commissioner for Justice* berkomentar bahwa keputusan kesetaraan dapat memfasilitasi perjalanan yang aman dengan jumlah sertifikat dari negara bagian yang terhubung dengan sisten EUDCC yang terus meningkat.²⁸

Kerja sama antara negara Indonesia dan Uni Eropa dalam kesetaraan pengakuan sertifikasi vaksin covid-19 yang nantinya akan memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri bagi pelajar, wisatawan, pekerja migran Indonesia, dan pelaku bisnis.²⁹ Senada dengan yang dikatakan oleh ibu Nidya Kartikasari, bahwa:

Kerja sama saling pengakuan sertifikasi vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu kebijakan untuk memastikan keleluasaan mobilitas/melakukan perjalanan (*free-movement*) bagi masyarakat, sesuai dengan kebijakan dan protokol kesehatan yang berlaku. Kerja sama ini juga bertujuan untuk mendorong kebangkitan perekonomian paska pandemi COVID-19 dengan cara meningkatkan perdagangan, pariwisata, serta investasi.... Diharapkan hal ini dapat mempermudah mobilitas warga UE di Indonesia utamanya menghadapi

²⁷ "Europe Recognizes PeduliLindungi App; Valid in 27 Countries," *Brit Cham Indonesia*, May 18, 2022, diakses pada 5 Desember 2022, <https://britcham.or.id/europe-recognizes-pedulilindungi-app-valid-in-27-countries/>

²⁸ "EU COVID Certificate: Commission Recognizes as Equal Vaccination Certificates Issued by 2 More Third Countries," *Schengenvisa News*, 5 April 2022, diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-covid-certificate-commission-recognizes-as-equal-vaccination-certificates-issued-by-2-more-third-countries/>

²⁹ Pemberlakuan Interoperabilitas Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Indonesia dan Uni Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, May 12, 2022, diakses pada 29 November 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3593/berita/pemberlakuan-interoperabilitas-sertifikat-vaksinasi-covid-19-indonesia-dan-uni-eropa>

pembukaan kembali pariwisata Indonesia dan mendorong pemulihan ekonomi paska pandemi.³⁰

Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa melibatkan 27 negara anggota Uni Eropa seperti Belgia, Belanda, Austria, Ceko, Rep, Estonia, Hongaria, Finlandia, Denmark, Jerman, Irlandia, Kroasia, Italia, Malta, Latvia, Luksemburg, Lithuania, Rumania, Siprus, Portugal, Slowakia, Polandia, Yunani, Spanyol, Swedia, dan Slovenia.³¹

Komisi Eropa dan Pemerintah RI dalam hal ini Kemenkes dan Kemenlu sepakat untuk saling pengakuan kesetaraan pada sertifikat vaksin Covid-19, pernyataan ini disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

Untuk kepentingan bersama (baik WNI yang akan ke Eropa dan WN Eropa yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia), maka Komisi Eropa dan Pemri (melalui Kemlu dan Kemkes) sepakat untuk saling pengakuan sertifikat vaksinasi COVID-19. Pengakuan sertifikat vaksinasi berlaku dua arah yaitu bagi Indonesia, sertifikat vaksinasi WNI dapat di-convert menjadi standar EU DCC agar dapat dibaca oleh petugas imigrasi dan tempat-tempat publik di Uni Eropa. Dan bagi Uni Eropa, sertifikat vaksinasi WN Eropa yang menggunakan standar EU DCC dapat dibaca oleh petugas KKP di bandara dan digunakan untuk masuk ke tempat-tempat publik di Indonesia.³²

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19 akan lebih mempermudah perjalanan wisatawan baik dari Indonesia ke Uni Eropa maupun sebaliknya, karena data dari kedua sistem EUDCC dan PeduliLindungi sudah diconvert sehingga dapat terbaca.

³⁰ Nidya Kartikasari, wawancara penulis secara online, 28 September 2022

³¹ Ibid

³² Kementerian Luar Negeri RI, wawancara penulis secara online, 7 Oktober 2022

Pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19 antara Indonesia dan Uni Eropa menghasilkan sebuah *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726* yang diresmikan pada tanggal 11 Mei 2022, yang bertujuan untuk memfasilitasi hak bebas bergerak di dalam serikat.³³ Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Nidya Kartikasari selaku Direktur KSIA Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI bahwa:

Implementation Decision pada intinya menyampaikan bahwa Sertifikat vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, dianggap setara dengan yang dikeluarkan sesuai dengan Regulation (EU) 2021/953, dalam rangka memfasilitasi hak bergerak bebas di dalam UE. Dengan demikian, Indonesia akan terhubung dengan EU Digital COVID Certificate trust framework.³⁴

Faktor yang mendasari terbentuknya *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726* adalah sertifikat COVID-19 yang diterbitkan oleh Indonesia telah sesuai dengan Regulasi (UE) 2021/953 Parlemen Eropa dan Dewan (*European Parliament and of the Council*).³⁵ Kesesuaian antara Regulasi UE 2021/953 dengan sertifikasi vaksinasi Covid-19 akan memunculkan kemungkinan untuk validitas, integritas sertifikat, dan verifikasi keaslian. Faktor lainnya adalah pada *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726*, nomor (10) disebutkan bahwa:

The necessary elements for establishing that COVID-19 vaccination certificates issued by the Republic of Indonesia in accordance with the

³³ "EU COVID-19 Response," Europe Daily News, May 11, 2022, diakses pada 28 November 2022, <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2022/05/europe-daily-news/europe-daily-news-may1122>

³⁴ Nidya Kartikasari, wawancara penulis secara online, 25 Oktober 2022

³⁵ "EU COVID-19 Response," Europe Daily News, May 11, 2022, diakses pada 28 November 2022, <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2022/05/europe-daily-news/europe-daily-news-may1122>

*'DIVOC' system are to be considered as equivalent to those issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 are thus fulfilled.*³⁶

Selain itu menurut Setiaji selaku staf ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan bahwa PeduliLindungi memiliki fitur penerbitan internasional dengan standar yang sama dengan QR code di Uni Eropa sehingga fitur QR code pada sertifikat internasional di PeduliLindungi dapat terbaca dan mendapat pengakuan dari Uni Eropa.³⁷

Dalam *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726* Indonesia telah menginformasikan beberapa poin terkait *interoperable* yaitu Indonesia telah menerbitkan sertifikat vaksin untuk Covid-19 (*interoperable vaccination certificates for COVID-19 vaccines*) vaksin tersebut meliputi Spikevas, CoronaVac, Comirnaty, BBIBP-KorV, dan Vaxzevria. Akan tetapi Indonesia menginformasikan kepada Komisi Eropa bahwa tidak mengeluarkan sertifikat test (*interoperable test certificates*) untuk tes amplifikasi asam nukleat maupun tes antigen cepat dan sertifikat pemulihan (*interoperable certificates of recovery*).³⁸

Commission Implementing Decision (EU) 2022/726 juga menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi yaitu pada saat verifikasi di Indonesia melakukan verifikasi sertifikat, data pribadi yang disertakan di dalamnya hanya akan diproses

³⁶ "Commission Implementing Decision (EU) 2022/726," *Official Journal of the European Union* L 134/35, May 11, 2022, diakses pada 28 November 2022, http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/726/oj

³⁷ "Pemberlakuan Interoperabilitas Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Indonesia dan Uni Eropa", Kementerian Luar Negeri RI, May 12, 2022, diakses pada 29 November 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3593/berita/pemberlakuan-interoperabilitas-sertifikat-vaksinasi-covid-19-indonesia-dan-uni-eropa>

³⁸ Ibid

untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi vaksinasi pemegang, hasil tes atau status pemulihan informasi pribadi tidak akan disimpan setelah proses selesai.

Implementing Decision atau keputusan pelaksanaan sendiri memiliki pengertian tindakan Uni Eropa yang mengikat secara hukum dan berlaku sama di semua negara anggota Uni Eropa. Bertujuan untuk menyamaratakan undang-undang di Eropa dan pokok bahasan setiap implementasi hanya melayani atau mencakup tujuan tertentu. *Implementing Decision* berkaitan dengan isu-isu yang sangat spesifik, sering menangani rincian legislasi yang sangat teknis, dan membahas badan hukum tertentu.³⁹

Commission Implementing Decision (EU) 2022/726 dibentuk dan disahkan oleh *European Commission* (Komisi Eropa) dan pemerintah Indonesia dalam hal ini sinergi antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI. Komisi Eropa adalah sebuah badan eksekutif di Uni Eropa yang memiliki kewenangan antara lain mengatur serta melaksanakan kebijakan dan budget Uni Eropa, sebagai badan perwakilan dari UE di level internasional, mengusulkan kebijakan kepada Dewan UE dan Parlemen UE, dan memastikan pelaksanaan peraturan yang ada di UE. Komisi Eropa terdiri dari 27 Komisioner, satu orang dari tiap negara anggota di UE. Serta masing-masing komisioner memegang satu isu atau lebih.⁴⁰

³⁹ "Implementing Decision," *EU Monitor*, diakses pada 28 November 2022, <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkh7chz09fy8>

⁴⁰ "Uni Eropa," *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia*, diakses pada 1 Desember 2022, <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>

C. Kementerian Luar Negeri RI

Kementrian luar negeri indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara indonesia meliputi urusan diplomatik anatar negara, ekonomi negara, budaya dan juga yang lainnya. Dalam peraturan presiden kemenlu memiliki tugas – tugas yang telah di tetapkan pada undang – undang kementerian luar negeri, dalam isi peraturan tersebut tugas kementerian luar negri akan di bantu oleh wakil menteri karena wakil menteri mempunyai kewajiban untuk membantu memimpin pelaksanaan tugas kepala kementerian luar negeri.

Di dalam skripsi yang berjudul Peran Kemenlu RI Dalam Mendapatkan Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Covid 19 Oleh Uni Eropa, kemenlu berperan menjembatani keperluan untuk mendapatkan pengakuan sertikat covid 19 oleh uni eropa karena system penerimaan sertifikat covid 19 di uni eropa jika ingin memasuki negara tersebut harus memiliki standar yang sama dengan milik uni eropa. Dalam menjembatani untuk mendapatkan kesetaran sertifikat covid 19 oleh uni eropa, kemenlu merasa menjalin kerja sama dengan uni eropa sangatlah penting karena kerja sama saling mengakui kesetaraan sertifikat vaksin covid 19 ini merupakan salah satu kebijakan untuk memastikan keleluasan mobilitas masyarakat sesuai kebijakan dan protokol kesehatan yang sudah di tentukan.

Negara – negara yang telah memiliki framework agreement on comprehensive partnership and cooperation beetwen the european community and its member states, of the one part, and the republic of indonesia, of the other part, tahun 2014 yang menjadi kerang kerja sama di bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya

termasuk kerja sama di bidang kesehatan dan teknologi juga. Perjanjian ini memayungi kerja sama RI – EU untuk saling pengakuan sertifikasi vaksin covid 19 dan interopebilitas aplikasi peduli lindungi, Indonesia juga terus berupaya untuk mendorong kerja sama pengakuan sertifikasi vaksin dengan seluruh pihak dengan mengedepankan prinsip non-diskriminatif dalam rangka mendukung pemulihan dunia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang proses input data yang diperoleh berdasarkan lisan dan perilaku dari sumber yang diamati berupa pengolahan kata-kata yang tertulis, data tersebut biasanya disebut sebagai data deskriptif.⁴¹

Studi deskriptif kualitatif ini mengkaji peran kemenlu RI dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan sertifikat covid 19 oleh uni eropa menjelaskan tentang peran kemenlu republik indonesia untuk memperoleh pernyataan yang akan diteruskan menjadi bentuk tulisan, kemudian di analisis menggunakan konsep dan teori yang digunakan dalam landasan konseptual peran kemenlu RI dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan sertifikat covid 19 oleh uni eropa yang melibatkan kemenlu untuk membantu peneliti menanggapi pernyataan masalah yang diajukan. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mencari informasi tentang peran Kementerian Luar Negeri RI sehingga dapat membantu Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan sertifikat covid 19 oleh uni eropa.

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor Kementerian Luar Negeri dan Kementran Kesehatan Republik Indonesia yang berada di Jalan Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia. Terdapat hambatan penyebaran virus

⁴¹ Lexy J, Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rosda Karya, 1994), 56.

covid 19. Sehingga dalam masa penelitian, peneliti hanya dapat melakukan interview dengan narasumber wakil dari kementerian luar negeri dan kementerian kesehatan republik indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengirim syarat izin yang sudah di setujui oleh kampus dan dikirim melalui email terkait. Peneliti memperoleh data literatur dari sumber tambahan yang diperoleh dari Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Balai Penelitian Sidoarjo dan Perpustakaan Daerah Surabaya. Jangka waktu untuk mendapatkan judul penelitian dan proposal penelitian adalah 1 September – 30 September 2022.

C. Tingkat Analisis Data

Mohtar Mas' oed menjelaskan terdapat lima tingkat analisa, yang terdiri dari⁴²

1. Individu yang peduli dengan kebiasaan dan sikap pembuat kebijakan seperti kepala pemerintahan, menteri, pemimpin militer, dll.
2. Kelompok kecil seperti kabinet, dewan keamanan, politikus, dll dan kelompok yang berfokus pada tindakan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.
3. Sebuah negara-bangsa yang menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan tentang hubungan internasional antara kebijakan luar negeri yang membentuk satu kesatuan yang utuh dengan negara-bangsa.
4. Kelompok negara dan negara bangsa tidak bertindak sendirian dalam hubungan internasional. Tetapi beberapa kelompok bekerja sama. Pada level ini, fokusnya

⁴² Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional* (Jakarta:PT. Ikrar Mandiriabadi, 1990),

adalah pada kelompok baik di tingkat regional maupun global, seperti aliansi, serikat pekerja, blok PBB, dll..

5. Sistem Internasional. Sistem internasional memainkan peran strategis penting dalam menciptakan hubungan internasional, yang dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan para aktor dalam hubungan internasional.

Dalam penelitian peneliti akan menggunakan tingkat negara-bangsa, sesuai dengan fokus peneliti yaitu terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh negara pada proses pembuatan keputusan internasional yaitu Commission Implementing Decision 2022/726 negara yang terlibat adalah Indonesia serta Uni Eropa.

D. Tahap – Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan inii, yang dilakukan oleh peneliti adalah pembuatan rumusan masalah tentang susunan peran kemenlu RI dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan sertifikat covid 19 oleh uni eropa. Kemudian penulis menyusun kerangka konseptual yaitu peran, kemenlu, kesetaraan sertifikat covid 19 yang digunakan sebagai rujukan oleh peneliti.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap implementasi, data dikumpulkan melalui survei literasi, yaitu. H. memperoleh data dokumenter dari buku, jurnal, artikel atau berita online dan offline lainnya, serta wawancara pendukung dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini.

3. Tahap Analisa Data

Dalam tahap analisis ini, peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu beberapa langkah kunci dalam analisis data, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik penumpulan data peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara dari narasumber terkait, dan data sekunder peneliti peroleh dari dokumentasi dan penelusuran data secara online dan offline.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar pendapat atau informasi atau ide melalui sesi tanya jawab, yang dapat menghasilkan tentang topik yang sedang dibahas.⁴³ Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pihak Kementerian Luar Negeri RI yaitu ibu Nidya Kartikasari selaku Direktur KSIA Amerika dan Eropa, Kementrian Luar Negeri RI dan salah satu pihak dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan penghimpunan, pencarian, penyelidikan, serta ketersediaan dokumen. Tujuan pendokumentasian adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari

⁴³ Dr. Sugiyono Prof, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D* (Bandung: Cv. Alfa Beta, 2010), 72.

berbagai sumber dan menyajikannya dengan cara yang disesuaikan dengan dokumen. Dalam proses pendokumentasian, dokumen resmi Kemlu harus dijadikan sebagai informasi, pemberitaan di media, laporan tahunan yang diterbitkan Kemlu sebagai peran kemenlu RI dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan sertifikat covid 19 oleh uni eropa .

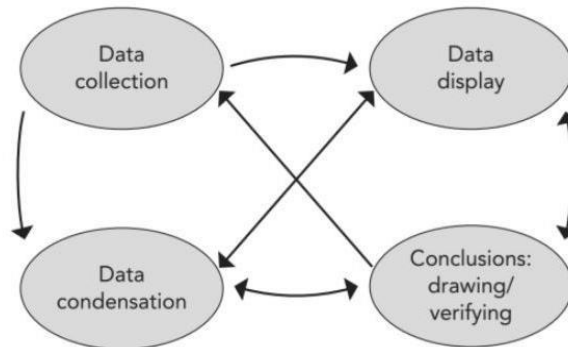
3. Penelusuran Data Online

Tahapan ini dilakukan dengan bantuan internet. Fasilitas yang diberikan oleh internet mengenai kelengkapan data atau informasi yang sedang dibutuhkan oleh peneliti. Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mengetikkan kata kunci yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁴ sumber dokumentasi dapat diperoleh dari internet berupa ejournal, e-book, dan artikel.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen-dokumen yang telah diolah terlebih dahulu untuk dianalisis, ditelaah, dan ditulis sebelum menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pencarian. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga cara meringkas data yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bersamaan dan serempak sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

⁴⁴ Ibid., 125.



Gambar 3. 1 Komponen Model Interaktif Analisis Data Kualitatif

Sumber: M. B. Miles, A. M. Huberman and Johnny Saldana, 2014⁴⁵

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses dimana data yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan dalam bentuk tulisan, atau hasil wawancara, makalah dan lainnya akan dilakukan analisis untuk membuat sederhana. Kegiatan yang kondensasi ini dilakukan untuk merangkum data, sehingga memperoleh makna untuk memperkuat data yang digunakan. Kompresi data terjadi sebelum data dikumpulkan secara keseluruhan. Agregasi informasi prediktif ini muncul ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam teknik analisis, pertanyaan penelitian apa yang akan diajukan, kasus apa yang akan dipelajari dan metode penelitian apa yang akan digunakan.⁴⁶

⁴⁵ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (USA: SAGE Publication, Inc., 2014), <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

⁴⁶ Ibid., 8

2. Menyajikan Data

Kegiatan penyajian data adalah mengumpulkan hasil-hasil informasi yang kemudian dapat menjadi sebuah kesimpulan dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Penyajian data pada jenis penelitian kualitatif ini berupa teks naratif dari hasil observasi lapangan. Data informasi yang diperoleh ini kemudian digabung dan disusun sehingga menjadi sebuah kesimpulan untuk rencana selanjutnya.

3. Proses Penarikan Kesimpulan

Proses ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Pada proses pengumpulan informasi dan data, peneliti menafsirkan apa yang diperoleh dengan mencatat semua pernyataan dan apa saja yang dapat ditafsirkan menjadi proporsi yang dapat menjelaskan sebab akibat. Kesimpulan juga mungkin tidak dapat diperoleh hingga akhir tergantung pada cara peneliti untuk mengambil data tersebut.

G. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data ini peneliti menggunakan untuk mengetahui bahwa hasil data yang dianalisa ini memiliki sifat objektif dan merupakan data yang tepat untuk menjadi laporan hasil penelitian. Menurut Craswell dan Miller, validitas dibangun atas dasar kepastian, dan hasil penelitian pada umumnya akurat atau setara dari sudut pandang peneliti, partisipan, dan pembaca.

Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketekunan Pengamat

Teknik ketekunan pengamat dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan ciri dan unsur pada suatu situasi yang relevan dengan isu yang berkaitan secara rinci yang

kemudian dapat berpusat pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam meningkatkan ketekunan peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi, peneliti memperoleh sumber informasi dari sumber yang bisa dipercaya seperti halnya *webiste* resmi dari Kemenlu, kantor berita lokal atau internasional, *e-journal* tentang Kemenlu, berita tentang aplikasi peduli lindungu di media dan lain sebagainya. Ketekunan peneliti dapat digunakan untuk menemukan fokus permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data yang didapat dan hasil analisisnya yang sesuai.

2. Triangulasi Sumber

Tekhnik yang dilakukan oleh peneliti berikutnya digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber uyang jelas untuk memperoleh penguatan kebenarannya dari uji kredibilitasnya. Triangulasi ini dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh hasil perbandingan dari data hasil wawancara dari ibu Nidya Kartikasari selaku Direktur KSIA Amerika dan Eropa kementrian luar negri RI sesuai dengan sumber dokumen dari website resmi Kemenlu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sertifikat Vaksin Covid-19 di Indonesia

Di Indonesia program vaksinasi COVID-19 resmi diselenggarakan mulai 13 Januari 2021, orang pertama yang mendapatkan vaksin di Indonesia adalah Presiden RI, Joko Widodo. Kebijakan percepatan vaksinasi di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, peraturan ini berisi tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan pemerintah dengan melakukan program vaksinasi COVID-19 secara nasional memiliki tujuan utama untuk mengurangi jumlah penularan Corona Virus dan usaha pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 3 Juli 2021 mengenai darurat PPKM. Pemerintah juga mempertegas sesuai dengan Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 yaitu masyarakat harus memperoleh dan menunjukkan kartu vaksin setidaknya dosis pertama. Peraturan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat bagi mereka yang akan melakukan aktifitas diluar ruangan, terlebih kepada yang melakukan perjalanan baik jalur laut, udara atau kendaraan umum.

Aturan ini ditujukan bagi mereka yang bepergian dengan kapal laut, pesawat, atau angkutan umum. Sertifikat vaksinasi dosis pertama mendorong pemerintah untuk melonggarkan aturan tentang kegiatan sosial, tetapi menjadi catatan bagi mereka yang

telah menerima setidaknya vaksinasi dosis pertama. Hal ini untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan menahan penyebaran virus Covid-19.

Sertifikat vaksin ini menjadi penunjang bagi masyarakat memperoleh kegiatan yang lebih bebas, karena dengan vaksinasi ini masyarakat yang menjalankan PKM memiliki perlindungan diri untuk diri mereka tanpa adanya kekhawatiran yang besar. Selain itu sertifikat vaksinasi ini ditujukan agar UMKM kembali hidup terlepas dari pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan ini dapat membuat masyarakat lebih antusias lagi dalam melakukan vaksinasi meskipun masih terdapat beberapa kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Melalui aplikasi peduli lindungi, masyarakat dapat mengunduh sertifikat vaksin setelah melakukan vaksinasi sesuai dosis yang mereka lakukan. Di Indonesia sendiri seuruh kegiatan sudah harus memiliki sertifikat vaksin sehingga sertifikat ini menjadi salah satu persyaratan administrasi saat melakukan pekerjaan, terutama saat bepergian.

Sasaran vaksin pada gelombang pertama diberikan kepada tenaga kesehatan atau nakes, TNI/Polri, petugas publik, hingga lansia. Selanjutnya, sasaran gelombang yang kedua diberikan kepada masyarakat yang dianggap kelompok rentan dan juga masyarakat umum yang lainnya. Pemerintah Indonesia berusaha menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam PP RI No. 99 Tahun 2020 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Vaksin dilakukan dalam 2 dosis bagi setiap orang. Ada 6 jenis vaksin produksi dari PT. Bio Farma yang telah dan akan digunakan di Indonesia, yaitu Astra Zeneca, Sinopharm atau China National

Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc dan juga BioNTech serta Sinovac Biotech Ltd.

Sistem pendataan sertifikat vaksin COVID19 dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Satu Data pada vaksinasi COVID-19, yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) para peserta vaksin dan kemudian sertifikat vaksin akan dikirim menggunakan pesan singkat melalui telepon seluler sesuai dengan nomor telepon penerima vaksin, lalu penerima vaksin dapat mencetak sertifikat secara pribadi. Namun saat ini kartu vaksinasi sudah bisa diunduh langsung dari aplikasi PeduliLindungi, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses vaksinasi secara langsung.

Kebijakan ini masih banyak menuai kritik karena bentuk kebijakannya yang dinilai belum jelas dalam memberikan sosialisasi, informasi, bahkan edukasi kepada publik atau masyarakat tentang penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan tidak semua masyarakat memiliki smart phone untuk mengakses aplikasi tersebut.

Adapun peran aplikasi PeduliLindungi salah satunya yaitu berperan mempermudah akses publik ke ruang publik. Aplikasi PeduliLindungi memiliki fungsi pemindaian kode QR yang digunakan untuk mengakses ruang publik. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk menggunakan tanpa mengeluarkan kartu vaksinasi, karena Anda dapat memasuki ruang publik hanya dengan memindai kode QR dengan aplikasi peduli.

Saat ini dengan adanya aturan baru yang mewajibkan adanya sertifikat vaksin atau aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki fasilitas umum diharapkan dapat

membantu pemerintah dalam memenuhi target jumlah masyarakat yang telah di vaksin di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi dan informasi pada aplikasi PeduliLindungi berperan penting dalam mempermudah proses tracking dan monitoring serta prediksi penyebaran virus COVID-19 dan mengetahui status vaksinasi. Pengembangan aplikasi PeduliLindungi terus berlanjut dan saat ini aplikasi tersebut berisi informasi tentang mis. tentang tahapan registrasi vaksin dan proses screening.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan tidak dipungut biaya serta masyarakat Indonesia dapat mengunduhnya melalui Google Playstore maupun App Store tanpa dipungut biaya. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunandi Sadikin menyampaikan bahwa peluncuran fitur QR Code pada aplikasi PeduliLindungi ini dinilai dapat membantu pemerintah serta masyarakat untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Fitur QR Code yang tersedia di setiap pintu masuk lokasi atau tempat tertentu ini membuat pengelola tempat atau ruang publik tersebut dapat mengatur dan memantau kepadatan pengunjung.

Oleh karena hal tersebut, aplikasi ini dapat membuat penggunanya merasa aman karena sudah memiliki sertifikat hasil vaksin sehingga dapat mengakses tempat-tempat publik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Penggunaan aplikasi ini dapat mendorong penggunanya agar segera melakukan vaksinasi. Selain karena kepentingan kesehatan dan imunitas juga karena saat ini vaksinasi menjadi syarat akses publik seperti memasuki tempat umum (mal, restoran, tempat wisata,

hotel), perjalanan atau mobilitas, pembelajaran tatap muka, bahkan untuk mendaftar pekerjaan.

Dilihat dari kegunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut dan fakta di lapangan maka aplikasi ini dinilai penting dan dapat mendorong percepatan vaksinasi, terutama pada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan memerlukan akses pelayanan publik. Aplikasi PeduliLindungi yang masih terbilang baru ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penyediaan sertifikat vaksin.

Salah satu misi dari aplikasi PeduliLindungi adalah mempermudah akses publik ke ruang publik. Aplikasi PeduliLindungi memiliki fungsi pemindaian kode QR yang digunakan untuk mengakses ruang publik. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk menggunakan tanpa mengeluarkan sertifikat vaksinasi, dan cukup dengan memindai kode QR dengan aplikasi Cares Protect, mereka dapat mengakses area publik.

B. Sertifikat Vaksin Covid-19 di Uni Eropa

Dampak terbatasnya akses wisatawan dari Asia Tenggara ke Uni Eropa hingga saat ini sulit dinilai. Pada tahun 2019, warga negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam menghabiskan hampir \$90 miliar, atau lebih dari 1,308 triliun rupiah, untuk perjalanan internasional. Menurut Institut ISEAS-Yusof Ishak, sebuah lembaga penelitian Asia Tenggara yang berbasis di Singapura, jumlah tersebut setara dengan hampir sepertiga dari pengeluaran perjalanan warga China.

Namun, sejak pandemi, pengeluaran pariwisata internasional di 6 negara ASEAN telah turun menjadi \$24,8 miliar pada tahun 2020 dan diperkirakan akan

meningkat lagi menjadi \$38 miliar pada tahun 2021. Beberapa analisis memperkirakan bahwa pariwisata di luar Asia Tenggara mulai membaik, namun The Economist Satuan Intelijen mengatakan jumlah tersebut tidak akan kembali ke tingkat sebelum pandemi hingga tahun 2024.⁴⁷

Di sisi lain, Uni Eropa terus mempercepat negosiasi dengan beberapa negara ASEAN untuk memulihkan hubungan sebelum pandemi. Igor Driesmans, duta besar Uni Eropa untuk blok ASEAN, mengatakan bahwa perjanjian penerbangan komprehensif UE-ASEAN yang baru saja dicapai akan mendorong lebih banyak penerbangan antar kawasan.

Vaksinasi bukan satu-satunya masalah. Masalah terbesar adalah vaksin apa yang diambil. Banyak negara Asia Tenggara bergantung pada donasi dari vaksin Sinovac China untuk fase vaksinasi pertama. Sinovac bertanggung jawab atas hampir sepertiga dari vaksin yang diberikan di Malaysia. Sedangkan Indonesia telah mengimpor 370 juta dosis vaksin Sinovac hingga akhir 2021. Sejauh ini, 10 negara UE seperti Prancis, Jerman, dan Italia tidak mengakui Sinovac. Pada saat yang sama, 11 negara Eropa tidak mengakui Sinopharm. Keduanya merupakan vaksin buatan China untuk melawan COVID-19. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun Uni Eropa mengakui sistem sertifikasi vaksin negara tersebut, ada kemungkinan pengunjung yang menerima vaksin buatan China tidak akan dapat memasuki negara UE.

⁴⁷ Rahka, Susanto, "UE Akui Paspor Vaksin 3 Negara ASEAN, Bagaimana Indonesia?", *DW*, Diakses dalam <https://www.dw.com/id/uni-eropa-hanya-akui-paspor-vaksin-covid-dari-tiga-negara-asean/a-61747617>, pada 01 November 2022.

Peraturan Sertifikat Digital Covid UE mulai berlaku pada 1 Juli 2021. Warga negara dan penduduk UE sekarang dapat menerbitkan dan memverifikasi Sertifika Digital Covid mereka di seluruh UE. Uni Eropa dan Indonesia telah sepakat untuk saling mengakui sertifikat vaksin COVID mereka. Hal ini berarti, saat memasuki Uni Eropa atau melakukan perjalanan antar Negara Anggota Uni Eropa, pemegang sertifikat vaksin Indonesia dapat menggunakannya dengan ketentuan yang sama dengan pemegang Sertifikat Digital COVID Uni Eropa (EU Digital COVID Certificate/ EUDCC).



Gambar 4. 1 Aplikasi EU Digital COVID Certificate/EUDCC
Sumber: LBC.co.uk⁴⁸

Sertifikat Digital COVID Uni Eropa adalah suatu bukti digital yang dimiliki seseorang yang berisi tentang bukti bahwa telah melakukan vaksinasi Covid-19, sembuh dari Covid-19, dan telah menerima hasil tes negatif Covid-19. Beberapa fitur yang ada dalam aplikasi EUDCC yaitu format digital atau kertas, dengan kode QR,

⁴⁸ Daisy Sthepans, "What is the EU Digital Covid Certificate and can I get one?," *lbc.co.uk*, July 2, 2021, diakses pada 1 Desember 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.lbc.co.uk/news/explained/what-is-the-eu-digital-covid-certificate-and-can-i-get-one/>

gratis dalam penggunaannya, terdapat pilihan bahasa nasional dan bahasa Inggris, aman dan nyaman saat digunakan, serta berlaku di semua negara Uni Eropa.⁴⁹ Sejalan dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI, bahwa:

Sertifikat vaksinasi di Eropa dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dalam bentuk fisik atau digital melalui portal eHealth masing-masing. Tidak ada aplikasi khusus yang digunakan untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi, namun terdapat aplikasi Digital Covid Pass untuk menyimpan sertifikat dalam bentuk digital. Tiap sertifikat vaksin memiliki QR Code bertanda khusus yang digunakan untuk verifikasi keaslian.⁵⁰

Pemegang Sertifikat Digital COVID Uni Eropa sekarang dapat menggunakannya untuk membuktikan status vaksin mereka untuk masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia dan Uni Eropa sekarang memperlakukan sertifikat masing-masing sebagai setara. Ini adalah langkah penting dalam tujuan bersama kita untuk memfasilitasi perjalanan yang aman dan mobilitas warga.

Hingga saat ini, Uni Eropa telah mencapai kesepakatan kesetaraan dengan 67 negara dan wilayah di lima benua, yang sekarang semuanya terhubung ke sistem Sertifikat Digital COVID Uni Eropa. Wisatawan Indonesia yang belum divaksinasi dengan vaksin yang disahkan di Uni Eropa masih perlu memeriksa vaksin mana yang diterima oleh masing-masing Negara Anggota Uni Eropa sebelum melakukan perjalanan

⁴⁹ “What is the EU Digital COVID Certificate?,” *An official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate

⁵⁰ Pihak Kementerian Luar Negeri RI, wawancara secara online, 7 Oktober 2022

Sertifikat Digital Covid Uni Eropa yang sekarang dikenal dengan istilah paspor vaksin, dalam pengurusannya tidak dikenai biaya. Semua warga negara UE dan non-warga negara UE yang secara resmi tinggal di Negara Anggota (yang memiliki hak untuk melakukan perjalanan ke Negara Anggota lainnya) dapat mengunduhnya atau menerimanya dalam bentuk kertas. Beberapa negara menggunakan sertifikat secara sukarela, tetapi secara resmi diluncurkan pada 1 Juli untuk periode enam minggu.

Cara kerja EUDCC yaitu didalam sertifikat ini terdapat kode QR dengan tanda tangan digital anti pemalsuan, dilakukan pemindaian kode QR dan tanda tangan diverifikasi ketika sertifikat diperiksa. Setiap badan seperti rumah sakit, otoritas kesehatan, dan tempat tes memiliki tanda tangan digital sendiri yang berbeda satu sama lain. Namun Komisi Eropa (*The European Commission*) membentuk gerbang agar tanda tangan sertifikat dapat dideteksi dan diverifikasi disemua negara anggota Uni Eropa, pada gerbang ini data pribadi pengguna tidak diperlukan untuk proses verifikasi. Komisi Eropa membantu negara anggota dalam pengembangan aplikasi nasional dan perangkat lunak untuk menyimpan, menerbitkan, memverifikasi sertifikat, dan mendukung pengujian untuk pemasangan *gateway* atau gerbang yang dibuat oleh Komisi Eropa.⁵¹ Penjelasan mengenai cara kerja EUDCC ini sesuai dengan penjelasan Direktur KSIA Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Di Uni Eropa, pemegang UEDCC (EU Digital Covid Certificate) tidak menscan QR code ketika memasuki tempat umum, berbeda dengan PeduliLindungi,

⁵¹ “How does the certificate work?,” *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#new-rules-on-the-validity-of-eu-digital-covid-certificate-and-the-coordination-of-safe-travel-in-the

pengguna cukup memindai sertifikat vaksin yang dimiliki dengan *verifier app* terpisah yang dilakukan oleh pemilik/pegawai tempat umum tersebut. EUDCC berisi kode QR dengan tanda tangan digital untuk melindunginya dari pemalsuan. Saat sertifikat vaksin diperiksa, kode QR dipindai dan tanda tangan diverifikasi.⁵²

Keempat vaksin yang disetujui untuk digunakan di Inggris juga disetujui di Uni Eropa - tetapi tiga vaksin tersebut terkadang dikenal dengan nama merk yang berbeda. Adapun penyebutan vaksin di Uni Eropa:

- a. Vaksin Pfizer-BioNTech terkadang dikenal sebagai Comirnaty
- b. Oxford-AstraZeneca (AZ) juga dikenal sebagai Vaxzevria
- c. Moderna juga dikenal sebagai Spikevax
- d. Janssen (kadang-kadang disebut sebagai vaksin Johnson & Johnson) sama seperti di Inggris

Tetapi dosis vaksin AZ yang diproduksi oleh Serum Institute in India (SII) juga dikenal dengan nama ketiga – Covishield. Dan meskipun identik dengan yang dibuat di Eropa, Uni Eropa belum mengizinkan penggunaannya. Covishield banyak digunakan di negara-negara miskin melalui program vaksinasi Covax, dan ada kekhawatiran bahwa paspor UE mendiskriminasi pelancong dari negara-negara tersebut.

Euroian Medicines Agency (EMA) tidak perlu menyetujui lokasi pembuatan AZ di India karena Uni Eropa tidak menerima dosis dari sana. Namun, diketahui bahwa Serum Institute meminta penggunaan mendesak UE untuk Covishield..

⁵² Nidya Kartikasai, wawancara penulis secara online, 25 Oktober 2022.

Sertifikat Digital Covid UE diterima di semua Negara Anggota UE. Ini membantu memastikan bahwa pembatasan yang ada saat ini dapat dicabut secara keseluruhan. Saat bepergian, pemegang Sertifikat Digital Covid UE pada prinsipnya harus dibebaskan dari pembatasan pergerakan bebas: Negara-negara Anggota harus menahan diri untuk tidak memberlakukan pembatasan perjalanan tambahan pada pemegang EUDCC, kecuali jika diperlukan dan proporsional untuk menjaga kesehatan masyarakat. Penggunaan sertifikat Covid-19 oleh negara anggota untuk keperluan domestik seperti akses ke suatu acara atau tempat akan tetapi hal ini tidak diatur di tingkat Uni Eropa. Oleh karena itu negara anggota harus menerima EUDCC agar para wisatawan tidak perlu menggunakan sertifikat nasional sebagai tambahan.⁵³

Mulai tanggal 11 Februari Uni Eropa mengeluarkan peraturan berlaku bagi semua negara-negara anggota, peraturan tersebut adalah menetapkan periode terikat selama 9 bulan untuk penerimaan sertifikat vaksin. Misalnya periode pemberian vaksin Johnson&Johnson dosis pertama ke dosis kedua rentang waktunya selama 270 hari. Akan tetapi untuk pemberian vaksin booster standar penerimaan vaksin ini tidak berlaku. Peraturan ini berlaku untuk perjalanan di dalam area Uni Eropa.⁵⁴

Uni Eropa menerapkan prinsip dimana setiap pembatasan gerak tidak boleh diskriminatif dan harus proporsional. Oleh karena itu bagi orang yang mempunyai

⁵³ “Potential use of certificates for access to facilities,” *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#how-does-it-help-free-movement

⁵⁴ “Validity of the certificates,” *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate

sertifikat Digital COVID UE maka sebelum melakukan perjalanan tidak perlu melakukan tes antigen dan melakukan karantina. EUDCC dianggap valid jika meliputi beberapa hal antara lain sertifikat vaksin setidaknya 14 hari dan tidak lebih dari 270 hari sejak vaksin dosis terakhir dari rangkaian vaksinasi primer atau telah menerima vaksin *booster*. Hasil tes pcr negatif tidak lebih dari 72 jam sebelum bepergian atau hasil tes antigen cepat yang negatif tidak lebih dari 24 jam sebelum bepergian. Sertifikat *recovery* yang menunjukkan tidak lebih dari 180 hari telah berlalu sejak ditetapkan tanggal tes PCR awal terdeteksi positif covid-19.⁵⁵ Namun sebaliknya orang tanpa sertifikat Digital COVID UE tetap diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat sebelum dan sesudah keberangkatan diberlakukan tes antigen dan isolasi atau karantina mandiri di tempat tujuan yang sangat terkena dampak.⁵⁶

Pada tanggal 1 Maret 2022, negara anggota Uni Eropa setuju bahwa untuk wisatawan atau pelancong diluar negara anggota Uni Eropa harus divaksin dengan vaksin yang disetujui oleh Uni Eropa atau WHO. Bagi orang yang pulih dari Covid-19 dapat melakukan perjalanan di area Uni Eropa setelah 180 hari dibuktikan dengan sertifikat Digital Covid UE atau sertifikat non- UE yang setara dengan EUDCC. Dewan

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ New rules on the validity of EU Digital COVID Certificate and the coordination of safe travel in the EU, *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#new-rules-on-the-validity-of-eu-digital-covid-certificate-and-the-coordination-of-safe-travel-in-the

akan meninjau situasi kesehatan dan memperbarui daftar negara yang mengharuskan memiliki bukti tes PCR negatif terlepas dari status vaksinasi.⁵⁷

Sertifikasi Covid Digital UE ini bertujuan untuk membantu memfasilitasi kebebasan mobilisasi serta perjalanan yang dilakukan oleh warga negara UE serta warga negara non-UE yang sudah berada di Uni Eropa. Untuk pembuktian status vaksinasi dari luar negara Uni Eropa, negara anggota dapat menerima sertifikasi vaksinasi dari negara non-UE yang berisi jenis vaksin, tanggal vaksin, dan identifikasi orang dengan mempertimbangkan validitas, verifikasi keaslian, dan integritas. Negara anggota Uni Eropa juga dapat menerbitkan sertifikat Digital COVID UE kepada warga negara non-anggota yang akan melakukan perjalanan di Uni Eropa dengan syarat bukti vaksinasi yang dapat divalidasi dan ditunjukkan.⁵⁸

Beberapa orang yang berhak mendapatkan sertifikat Digital COVID UE yaitu pertama, semua warga negara Eropa dan seluruh anggota keluarganya. Kedua, untuk anak-anak diatas umur 12-17 tahun menurut *European Medicines Agency (EMA)* diperbolehkan untuk mendapat vaksin jenis BioNTech Pfizer Comirnaty dan vaksin Moderna Spikevax. Selain itu anak-anak diumur 12-17 tahun ini mendapat tes antigen maupun sertifikat *recovery*. Sementara untuk anak dibawah umur 12 tahun tidak dikenakan karantina karena berpergian dengan orang tua yang tidak memerlukan proses karantina karena sudah divaksin, anak dibawah umur ini juga tidak perlu

⁵⁷ “Can non-EU citizens travel to the EU?”, *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate

⁵⁸ Ibid

melakukan tes covid. Ketiga, warga negara Uni Eropa yang mendapatkan vaksin di negara ketiga yang dapat meminta sertifikat Digital COVID UE di negara anggota mereka tinggal atau tempat kewarganegaraan dengan cara menunjukkan bukti vaksin dengan jenis vaksin yang disetujui oleh Uni Eropa. Alternatif lainnya adalah Uni Eropa dapat mengakui secara otomatis sertifikat dari negara lain dengan keputusan kesetaraan. Saat ini ada sekitar 49 negara yang mengadopsi keputusan kesetaraan yang akan diakui dalam kondisi yang sama dengan Digital COVID UE.⁵⁹

Ada 49 negara dengan resolusi kesetaraan yang sama: Albania, Andorra, Armenia, Bahrain, Benin, Brasil, Tanjung Verde, Kolombia, Ekuador, El Salvador, Kepulauan Faroe, Georgia, Israel, Islandia, Indonesia, Yordania, Republik Korea, Kosovo, Lebanon, Liechtenstein, Madagaskar, Malaysia, Moldova, Monako, Montenegro, Maroko, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Oman, Panama, Peru, Filipina, San Marino, Serbia, Seychelles, Singapura, Swiss, Taiwan, Thailand, Tunisia, Togo, Türkiye, Ukraina, Britania Raya dan Dependensi Mahkota (Jersey, Guernsey, dan Isle of Man), Uruguay, Vietnam, dan Kota Vatikan.⁶⁰

Peraturan setiap negara anggota Uni Eropa berbeda dalam penggunaan EUDCC, khususnya bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke negara anggota tersebut. **Austria** tidak ada lagi pembatasan perjalanan bagi wisatawan, akan tetapi jika berada

⁵⁹ “Who can get the EU Digital COVID certificate?,” *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate

⁶⁰ “Recognition by the EU of COVID certificates issued by third (non-EU) countries”, *An Official EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#can-non-eu-citizens-travel-to-the-eu

di transportasi umum dan apotek harus menggunakan masker jenis FFP2. **Belanda** tidak ada persyaratan khusus Covid-19 jika berkunjung ke negara ini. **Belgia** menghapus pembatasan perjalanan bagi wisatawan. **Bulgaria** tidak mewajibkan pengunjung menunjukkan bukti sertifikat vaksin serta tes negatif Covid. **Republik Ceko** tidak ada lagi pembatasan perjalanan untuk wisatawan baik dari UE maupun non-UE. **Denmark** menghapus pembatasan perjalanan bagi wisatawan mancanegara, namun peraturan pembatasan perjalanan ini akan diaktifkan lagi oleh pemerintah jika kondisi resiko Covid kembali tinggi serta ada jenis varian Covid baru muncul.⁶¹

Estonia meniadakan pembatasan perjalanan bagi wisatawan di setiap negara. **Finlandia** tidak ada pembatasan perjalanan baik wisatawan dari UE, negara dengan daftar hijau, dan area perjalanan Schengen. **Jerman** terhubung dengan sistem EUDCC dimana memungkinkan adanya bebas pembatasan perjalanan tetapi para wisatawan baik dari UE maupun EEA menunjukkan bukti sertifikat vaksin dan tes Covid dengan hasil negatif, akan berlaku hingga 31 Januari 2023. **Perancis** dapat memasuki negara ini tanpa dokumen Covid dan diperbolehkan tidak memakai masker kecuali di tempat perawatan kesehatan. **Hongaria** wisatawan bebas untuk berkunjung ke negara ini tanpa ada batasan karena Covid dan penggunaan masker tidak wajib kecuali jika berada di tempat pelayanan kesehatan atau rumah sakit.⁶²

⁶¹ Hannah Brown dan Euronews Travel, "UPDATED: Where can I travel in Europe? A list of COVID entry rules for every European country," *Euronews Travel*, October 28, 2022, diakses pada 1 Desember 2022, <https://www.google.com/amp/www.euronews.com/travel/amp/2022/10/21/what-s-the-latest-on-european-travel-restrictions>

⁶² Ibid

Irlandia kebijakan pembatasan bergerak di negara ini telah dihapuskan oleh pihak berwenang dan penggunaan pemakaian masker tidak diwajibkan kecuali sedang berada di transportasi umum. **Italia** dapat masuk ke negara ini wisatawan tidak diharuskan menunjukkan dokumen Covid dan meskipun penggunaan masker tidak diwajibkan namun diharuskan menggunakan masker jika berada dalam acara besar di dalam dan luar ruangan yang ramai. **Latvia** wisatawan diterima di negara ini terlepas dari sertifikat vaksin dan tidak perlu melakukan tes Covid. **Lituania** tidak ada pembatasan perjalanan Covid wisatawan bebas berkunjung. **Luksemburg** mulai 1 Oktober wisatawan dari semua negara bebas berkunjung tanpa ada pembatasan karena Covid.⁶³

Di **Malta** tidak ada pembatasan perjalanan dan masker tidak wajib digunakan kecuali berada di rumah sakit, panti jompo, dan penerbangan. **Polandia** menghapus peraturan masuk baik wisatawan dari Uni Eropa maupun non-UE. **Portugal** tidak ada lagi pembatasan perjalanan karena Covid, tetapi masker tetap diharuskan dipakai ketika berada di pesawat atau transportasi lainnya. **Rumania** pembatasan perjalanan tidak diberlakukan lagi di negara ini, dengan kata lain jika memasuki Rumania wisatawan tidak perlu menunjukkan bukti tes negatif pra-keberangkatan atau pasca-keberangkatan serta bukti vaksin. **Siprus** persyaratan masuk khusus Covid dinegara ini ditiadakan dan tidak harus memakai masker di dalam ruangan kecuali berada di transportasi umum, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan lainnya.⁶⁴

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

Slovakia semua wisatawan boleh berkunjung ke negara ini tanpa ada pembatasan perjalanan akibat Covid. **Slovenia** tidak ada pembatasan perjalanan siapapun diperbolehkan berkunjung, tetapi tetap memakai masker ketika berada di transportasi umum. **Spain** mulai memberhentikan pembatasan perjalanan karena Covid pada tanggal 21 Oktober 2022, tetapi diharuskan memakai masker di tempat pelayanan kesehatan dan transportasi umum. Peraturan ini diharapkan berlaku hingga bulan Maret 2023. **Swedia** wisatawan memasuki negara ini tanpa ada pembatasan perjalanan, akan tetapi orang yang belum divaksin tidak diperkenankan berada di tempat ramai dan dalam ruangan. Terakhir di **Yunani** wisatawan boleh masuk tanpa ada batasan perjalanan karena Covid, akan tetapi diharuskan memakai masker di tempat perawatan kesehatan dan transportasi umum dengan jenis masker wajah FFP2 dan KN95. Jika wisatawan dinyatakan positif Covid maka tidak perlu dikarantina.⁶⁵

C. Tujuan Pengakuan Kesetaraan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Tujuan dari saling pengakuan ini untuk membuka kembali *safe travel* antara Indonesia dan Uni Eropa seperti yang dikatakan oleh Nidya Kartikasari, bahwa:

Saling pengakuan ini akan mendukung pembukaan kembali *safe travel* antar Indonesia dan 27 negara UE serta negara-negara lainnya yang telah masuk ke dalam EU-DCC system, dan untuk menghindari risiko perbedaan format sertifikat vaksinasi yang dimiliki oleh *travelers* dapat menjadi hambatan yang tidak perlu pada pembukaan kembali *cross-border travel*.⁶⁶

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

Pembukaan *safe travel* sejalan dengan tujuan dari Indonesia untuk meningkatkan minat wisatawan dari Eropa untuk berlibur ke Indonesia pada musim liburan, hal ini dipaparkan oleh Andri Hadi selaku Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa. Sementara di Uni Eropa negara Indonesia telah masuk dalam daftar *white list* di bulan November 2021.⁶⁷

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri RI yang dilansir dari wawancara dengan penulis bahwa kerja sama Indonesia dan Uni Eropa dalam pengakuan sertifikasi vaksinasi COVID-19 dilakukan antara lain untuk⁶⁸:

- a. Membuka perjalanan dari dan ke Indonesia yang memiliki nilai strategis (perjalanan dinas dan bisnis).

Tujuan dari kerjasama ini adalah memberikan fasilitas kemudahan perjalanan luar negeri untuk pemulihan ekonomi, aktor yang melakukan perjalanan ini seperti pekerja migran Indonesia, wisatawan mancanegara, pelaku usaha dan bisnis, serta pelajar.⁶⁹ Kemudahan dalam mengakses sertifikat vaksin karena adanya sistem interoperabilitas antara PeduliLindungi dengan EUDCC mengakibatkan para pengusaha dari Uni Eropa ke Indonesia maupun sebaliknya tidak mendapat hambatan berlebih dan tetap mematuhi protokol kesehatan di negara tujuan bisnis.

⁶⁷ Suci Sekarwati, "PeduliLindungi Diakui Eropa, Duta Besar Andri: Ini Bukti Penguatan Kerja Sama," *Tempo.co*, 13 Mei 2022, diakses pada 29 November 2022, <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1591138/pedulilindungi-diakui-eropa-duta-besar-andri-ini-bukti-penguatan-kerja-sama>

⁶⁸ Kementerian Luar Negeri RI, Wawancara penulis secara online, 7 Oktober 2022

⁶⁹ Akbar Evandio, "Indonesia-Uni Eropa Akui Sertifikat Vaksin, Kemenkes: Tetap Harus Unduh PeduliLindungi," *Bisnis.com*, May 12, 2022, diakses pada 30 November 2022, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20220512/15/1532633/indonesia-uni-eropa-akui-sertifikat-vaksin-kemenkes-tetap-harus-unduh-pedulilindungi>

b. Mendukung pembukaan pariwisata Indonesia.

Menurut Andri Hadi selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa bahwa pengakuan kesetaraan sertifikat vaksin Covid merupakan langkah positif dan meningkatkan minat wisatawan dari Uni Eropa untuk berkunjung ke Indonesia.⁷⁰ Andri Hadi juga menjelaskan bahwa pengakuan kesetaraan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah bentuk nyata penguatan kerjasama yang terjalin antara keduanya.⁷¹

Seperti yang diketahui pandemi Covid berdampak pada sektor sosial dan ekonomi khususnya di bidang pariwisata. Terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 80%. Penurunan ini mengakibatkan lebih dari 100 juta pekerja secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampak signifikan. Oleh karena itu pemerintah memperkuat sektor ketahanan pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan ekonomi paska pandemi. Memanfaatkan dukungan dari mitra internasional dan para anggota G20 termasuk salah satunya yaitu Uni Eropa.⁷²

c. Mendorong pengakuan atas jenis-jenis vaksin yang pada saat itu belum diakui oleh WHO (seperti Sinovac)

⁷⁰ Wasti Samaria Simangunsong, "Resmi! Aplikasi PeduliLindungi Bisa Dipakai di 27 Negara Uni Eropa," *Kompas.com*, diakses pada 30 November 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/2022/05/12/181842627/resmi-aplikasi-pedulilindungi-bisa-dipakai-di-27-negara-uni-eropa>

⁷¹ "PeduliLindungi Bisa Dipakai di ASEAN & 27 Negara Eropa," *CXO Media*, May 18, 2022, diakses pada 30 November 2022, <https://www.cxomedia.id/art-and-culture/20220518161146-24-174897/pedulilindungi-bisa-dipakai-di-asean-27-negara-eropa>

⁷² "Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Didukung Program Penguatan Digital," *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, February 15, 2022, diakses 30 November 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3718/upaya-pemulihan-sektor-pariwisata-didukung-program-penguatan-digital>

Sebelum adanya pengakuan kesetaraan terhadap sertifikat vaksin Covid antara Indonesia dengan Uni Eropa wilayah Uni Eropa hanya memperbolehkan atau menerima kunjungan ke negara anggotanya menggunakan visa dan vaksin. Namun vaksin yang diterima UE sesuai badan *European Medicine Agency* (EMA) adalah prifizer, moderna, jhonson&jhonson, dan astrazeneca.⁷³ Dalam permasalahan ini Indonesia melalui perwakilannya yaitu KBRI di Brussel, Belgia berkoordinasi agar sertifikat vaksin Indonesia dapat diakui oleh UE. Selain itu menurut Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Kementerian Kesehatan Indonesia menghargai keputusan jenis vaksin yang diterima oleh UE tersebut karena memang semua tergantung pada kebijakan negara masing-masing bahkan ada sebagian negara yang menerapkan vaksinasi saat tiba di negara tersebut.⁷⁴

Setelah adanya kesepakatan *Commission Implementing Decision 2022/726* di nomor 6 disebutkan bahwa:

*In addition, the Republic of Indonesia informed the Commission that it issues interoperable vaccination certificates for COVID-19 vaccines. Those vaccines currently include Comirnaty, Spikevax, CoronaVac, Vaxzevria and BBIBP-CorV.*⁷⁵

Disebutkan salah satu jenis vaksin yang diakui adalah CoronaVac. CoronaVac jenis vaksin yang dikembangkan oleh farmasi China yaitu SinoVac Biotech, vaksin ini

⁷³ “Uni Eropa Masukkan Indonesia dalam Daftar Negara yang Bisa Kunjungi Uni Eropa,” *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia*, 18 November 2021, diakses pada 30 November 2022, <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/17522/uni-eropa-masukkan-indonesia-dalam-daftar-negara-yang-bisa-kunjungi-uni-eropa>

⁷⁴ Rahka Susanto, “UE Akui Paspur Vaksin 3 Negara ASEAN, Bagaimana Indonesia?,” *DW.com*, May 10, 2022, diakses pada 30 November 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/id/uni-eropa-hanya-akui-paspor-vaksin-covid-dari-tiga-negara-asean/a-61747617>

⁷⁵ Commission Implementing Decision (EU) 2022/726,

memilih bermitra dengan Indonesia BioFarma untuk menjalankan uji klinis tahap akhir di Fakultas Kedokteran Padjajaran.⁷⁶ CoronaVac ini berasal dari virus yang dilemahkan atau dibunuh dengan zat kimia yang telah digunakan di China untuk disuntikkan ke ratusan ribu orang dalam program penggunaan darurat.⁷⁷ Dengan kata lain setelah terjadinya pengakuan kesetaraan pada sertifikat vaksinasi ini maka Uni Eropa harus menerima sertifikat vaksinasi dengan jenis vaksin SinoVac karena CoronaVac masih satu perusahaan dengan SinoVac dan dibuat oleh negara China.

d. Menciptakan perjalanan yang lebih *seamless* dan aman.

Indonesia menjadi pelopor dalam metode *seamless travelling*, inovasi ini diperkenalkan pada acara *Kick-Off Tourism Working Group G20* pada bulan Februari 2022.⁷⁸ Inovasi dengan metode *seamless* ini ditunjukkan untuk pembangunan infrastruktur pada pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia⁷⁹ Perjalanan yang *seamless* atau dengan kata lain tanpa adanya hambatan telah menjadi kesepakatan bersama baik Indonesia maupun Uni Eropa memberikan hak kebebasan pergerakan. Uni Eropa telah mengatur kebebasan dalam pergerakan dalam *Regulation (EU) 2021/953*.

⁷⁶ Berita Satu dan Jayanty Nada Shofa, "Indonesia Starts CoronaVac Phase 3 Clinical Trials," 11 August, 2020, diakses pada 30 November 2022, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-starts-coronavac-phase-3-clinical-trials>

⁷⁷ "Mengenal Vaksin Corona Vac," FKM UNAIR, diakses pada 30 November 2022, <https://fkm.unair.ac.id/5969/>

⁷⁸ "Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Didukung Program Penguatan Digital," *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*

⁷⁹ Michelle Natalia, "Lewat Seamless Travelling, Indonesia Diyakini Jadi Pelopor Inovasi di Ajang G20," *IDX Channel.com*, February 15, 2022, diakses pada 30 November 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/lewat-seamless-travelling-indonesia-diyakini-jadi-pelopor-inovasi-di-ajang-g20>

Sementara itu untuk menciptakan perjalanan yang aman telah disebutkan bahwa dalam masalah privasi data pribadi Indonesia memastikan akan melindungi informasi data pribadi pengguna seperti yang dijelaskan dalam Commission Implementing Decision 2022/726 pada nomor 9 bahwa:

*In addition, the Republic of Indonesia informed the Commission that when verifiers in Indonesia verify certificates, the personal data included in them will be processed only to verify and confirm the holder's vaccination, test result or recovery status and will not be retained afterwards.*⁸⁰

Pihak Indonesia tidak akan mempertahankan data pribadi pengguna ketika proses verifikasi vaksinasi telah dilakukan saat wisatawan mancanegara khususnya dari Uni Eropa memasuki wilayah Indonesia.

Pengakuan saling kesetaraan pada sertifikat vaksinasi Covid-19 antara Indonesia dan Uni Eropa ini memberi dampak positif salah satunya pada kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dari beberapa negara anggota Uni Eropa. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Nidya Kartikasari selaku Direktur KSIA Amerika dan Eropa saat diwawancari oleh penulis bahwa , “Menurut data BPS, data wisman dari Eropa meningkat sejak bulan Mei hingga Juli (data yang tersedia) sebagai berikut: Mei: 52.766 wisatawan, Juni: 68.520 wisatawan, dan Juli: 116.744 wisatawan.”⁸¹

Tren kenaikan wisatawan mancanegara beberapa negara Uni Eropa ke Indonesia ini juga dijelaskan oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara dengan penulis, yaitu:

⁸⁰ Commission Implementing Decision (EU) 2022/726, http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/726/oj

⁸¹ Nidya Kartikasari, wawancara penulis secara online, 28 September 2022

Pada bulan Juli, rata-rata kenaikan kunjungan wisatawan dari negara Uni Eropa mencapai 74% dari jumlah kunjungan pada bulan Juni 2022. Jumlah wisatawan dari Prancis misalnya, naik 101% dari 10.151 menjadi 20.360 orang, dari Belanda naik 134% dari 6.953 menjadi 16.253 kunjungan, dan dari Jerman naik 42% dari 10.402 menjadi 14.816. Tren kenaikan ini terjadi di hampir 27 negara Uni Eropa.⁸²

Tabel 4. 1
Kunjungan wisatawan mancanegara beberapa negara Uni Eropa pada bulan Mei hingga September Tahun 2022

Negara	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Austria	643	795	2.032	2.034	1.807
Belanda	6.054	6.953	16.253	13.029	13.041
Belgium	1.236	1.766	4.382	3.138	3.619
Bulgaria	108	167	185	249	330
Ceko	357	525	833	718	945
Denmark	1.338	1.723	4.523	2.064	2.335
Estonia	68	104	88	110	162
Finlandia	275	377	370	336	616
Hongaria	354	540	601	790	811
Irlandia	888	1.554	2.269	2.002	2.197
Jerman	8.500	10.403	14.816	21.374	21.143
Kroasia/croasia	90	135	159	254	187
Latvia	87	126	109	173	244
Lithuania	217	279	330	423	479
Luxemburg	36	51	127	255	101
Malta	46	66	112	135	107
Polandia	1.140	1.487	1.876	2.475	2.702
Portugal	563	989	1.584	2.271	2.147
Cyprus	44	59	178	429	139
Slovakia	184	224	348	374	359
Slovenia	39	113	184	181	181
Spanyol	1.849	2.860	6.187	9.643	6.348
Swedia	732	1.166	1.244	970	1.408
Yunani	133	186	397	1.024	472

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022⁸³

⁸² Kementerian Luar Negeri RI, wawancara penulis secara online, 7 Oktober 2022

⁸³ Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan), BPS, diakses pada 30 November 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/16/1470/1/kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html>

D. Aplikasi PeduliLindungi dari Indonesia Sesuai Standar DIVOC

Penerapan PeduliLindungi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19, pada tataran implementasi banyak permasalahan yang muncul dan harus diselesaikan. Salah satu upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19 adalah penerapan aplikasi PeduliLindungi yang pada dasarnya ditujukan untuk melacak aktivitas masyarakat di fasilitas umum.

Aplikasi PeduliLindungi memberikan batasan masyarakat, dimana pada area atau wilayah tertentu hanya orang yang telah menyelesaikan vaksinasi putaran pertama atau kedua yang diperbolehkan masuk ke fasilitas umum. Aplikasi PeduliLindungi juga memastikan masyarakat yang terjangkit Covid-19 tidak memiliki akses ke fasilitas umum.⁸⁴

Sistem operasi aplikasi PeduliLindungi adalah menggunakan koneksi melalui jaringan Bluetooth dan GPS yang terdapat pada perangkat warga, caranya warga mengunduh aplikasi PeduliLindungi, kemudian melakukan registrasi dan mengisi identitas diri sesuai keasliannya.⁸⁵

Warga masyarakat apabila akan mengakses fasilitas publik, maka diwajibkan untuk melakukan pemindaian terhadap Barcode/QR Code yang telah tersedia di pintu gerbang sebelum masuk kedalam fasilitas publik tersebut, hasil dari pemindaian

⁸⁴ Dalam R. Aditya, "PeduliLindungi, Situs Download Sertifikat Vaksin Covid-19," suara.com, 2021. [Online]. Available: <https://www.suara.com/news/2021/07/16/202143/pedulilindungi-situs-downloadsertifikat-vaksin-covid-19?page=all>, diakses pada 30 Juli 2022.

⁸⁵ Afiana, I. R. Yunita, L. D. Oktaviana, and Us. Hasanah, "Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19," Jurnal Pengabd. Mitra Masyarakat., Vol. 2, No. 2, Th 2020, 98–106.

Barcode/QR Code kemudian akan menentukan mengenai kelayakan warga masyarakat tersebut apakah dinyatakan dapat mengakses layanan fasilitas publik atau ditolak, semisal dikarenakan warga masyarakat tersebut dalam keadaan sedang isolasi mandiri Covid-19 yang mengharuskan untuk tetap berada di tempat isolasi mandiri.

Fasilitas publik yang akan melakukan proses pemindaian sebagai proses penyaringan terhadap warga masyarakat melalui aplikasi PeduliLindungi harus merupakan fasilitas publik yang penyelenggaraannya sudah diperbolehkan dan diatur melalui peraturan perundangan, seperti operasional pusat perbelanjaan/mall yang berada di zona 2 dan zona 3 PPKM. Dalam konteks ini pemerintah akan memastikan bahwa hanya pihak pengelola fasilitas publik yang sudah diberi izin operasional yang dapat menyelenggarakan penerapan aplikasi PeduliLindungi.



Gambar 4. 2 Tampilan Aplikasi PeduliLindungi

Sumber : Liputan6⁸⁶

Hasil dari pemindaian Barcode/QR Code tersebut maka akan mampu menyeleksi masyarakat yang benar-benar tidak memiliki potensi penularan Covid-

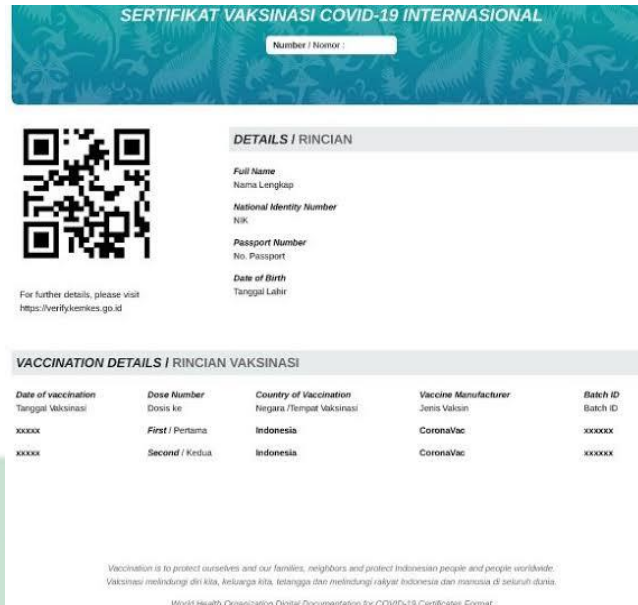
⁸⁶ Iskandar, "Aplikasi PeduliLindungi Sudah Ada di Play Store, Yuk Instal untuk Cegah Covid-19," *Liputan6*, Maret 30, 2020, diakses pada 6 Desember 2022, <https://m.liputan6.com/teknoread/4214828/aplikasi-pedulilindungi-sudah-ada-di-play-store-yuk-instal-untuk-cegah-covid-19>

19 yang diperbolehkan mengakses fasilitas publik dan sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19, minimal pada dosis pertama.

Pada bulan Januari 2022 aplikasi PeduliLindungi secara resmi mengeluarkan fitur baru yaitu pengguna dapat melakukan akses sertifikat vaksin Covid-19 Internasional sesuai dengan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Fitur ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk mengantisipasi isy sertifikat vaksin Indonesia yang tidak diakui atau dikenal di sejumlah negara luar negeri.⁸⁷ Menurut Setiaji selaku Chief of Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan RI bahwa untuk fitur sertifikat vaksin internasional telah disesuaikan dengan standar WHO termasuk juga kode QR agar dapat diakui dan terbaca saat di luar negeri. Sertifikat vaksin internasional ini digunakan sebagai bukti bahwa orang itu telah melakukan vaksin primer (dosis 1 dan dosis 2). Sertifikat vaksin internasional ini diakses melalui aplikasi PeduliLindungi dengan cara masuk aplikasi, pilih bagian menu “Sertifikat vaksin”, bagian “Sertifikat Perjalanan Luar Negeri,” klik tanda “+”, centang nama pengguna untuk pembuatan sertifikat vaksin luar negeri, pilih negara tujuan, dan terakhir sertifikat vaksin luar negeri telah aktif⁸⁸

⁸⁷ Ayu Rifka Sitoresmi, “Sertifikat Vaksin Internasional Sudah Ada di PeduliLindungi, Ini Cara Cek dan Downloadnya,” February 06, 2022, diakses pada 6 Desember 2022, <https://m.liputan6.com/hot/read/4879428/sertifikat-vaksin-internasional-sudah-ada-di-pedulilindungi-ini-cara-cek-dan-downloadnya>

⁸⁸ Rokom, “Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional sesuai Standar WHO,” *Sehat Negeriku*, Januari 28, 2022, diakses pada 29 November 2022, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220128/4639226/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-sesuai-standar-who/>



Gambar 4. 3 Tampilan Seritifikat Vaksinasi Covid-19 Internasional di PeduliLindungi

Sumber : SehatNegeriku Kemkes RI⁸⁹

Keterkaitan DIVOC dengan sertikat vaksinasi Covid-19 berstandar WHO yaitu DIVOC adalah sebuah *digital public good* (DPG) dibentuk oleh eGov Foundation, dirancang dengan spesifikasi internasional yang tepat, diakui oleh 120 negara secara global dan sesuai dengan standar WHO dan UE. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam sistem DIVOC.⁹⁰ DIVOC (*The Digital Infrastructure for Vaccination Open Credentialing*) adalah sebuah platform dimana sebuah negara dapat

⁸⁹ Rokom, "Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional sesuai Standar WHO," *SehatNegeriku*, Januari 28, 2022, diakses pada 6 Desember 2022, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220128/4639226/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-sesuai-standar-who/>

⁹⁰ "DIVOC-Landmark 2 billion COVID-19 certificates issued across 5 countries," *Stay Featured*, diakses pada 6 Desember 2022, <https://www.stayfeatured.com/post/divoc-landmark-2-billion-covid-19-certificates-issued-across-5-countries>

mengatur digital kampanye berskala besar seperti program vaksinasi dan sertifikasi.⁹¹ DIVOC secara umum dapat mengidentifikasi vaksinasi, serta informasi terperinci tentang user atau pengguna aplikasi seperti alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nama, dan lain sebagainya.⁹² Kemudian pada tanggal 12 April 2022 atas permintaan Indonesia, Komisi Eropa melakukan uji teknis kepada sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh Indonesia dan hasilnya sesuai dengan sistem DIVOC serta berisi data yang diperlukan oleh sistem tersebut. Hal ini membuat sertifikat vaksinasi dapat dioperasikan dengan kerangka kepercayaan yang ditetapkan oleh Regulasi (UE) 2021/953, dan memungkinkan untuk verifikasi keaslian, validitas dan integritas sertifikat.⁹³

Dalam *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726* Republik Indonesia memberikan informasi bahwa sertifikat vaksinasi Covid-19 dapat dioperasikan dibawah sistem yang bernama “DIVOC”.⁹⁴ Bukti bahwa aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan standar sistem DIVOC diperkuat dengan pernyataan dari pihakk Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara dengan penulis bahwa, “Indonesia telah memiliki infrastruktur sertifikasi vaksinasi melalui aplikasi PeduliLindungi yang telah dilengkapi dengan standar *Digital Infrastructure for*

⁹¹“ Introduction to Divoc,” *Divoc*, diakses pada 28 November 2022, <https://divoc.digit.org/>

⁹² Lucy Yang, “DIVOC – Understanding the Global COVID Certificate Landscape,” *Public Health*, October 31, 2021, diakses pada 28 November 2022, <https://www.lfph.io/2021/10/13/divoc/>

⁹³ Commission Implementing Decision (EU) 2022/726

⁹⁴ “Commission Implementing Decision (EU) 2022/726,” *Official Journal of the European Unio L 134/35*, May 11, 2022, diakses pada 28 November 2022, http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/726/oj

Vaccination Open Credentialing (DIVOC) atau standar WHO yang paling banyak digunakan negara-negara di dunia (lebih dari 90 negara) sejak Desember 2021.”⁹⁵

Pada pembahasan ini maka sesuai dengan indikator menurut Geoff Mulgan yaitu pembelajaran (*learning*) yang berarti pada tahap pembelajaran inovasi terus berubah dan berevolusi dengan menjadi eksplisit dan formal saat praktik dikerjakan dan organisasi atau pemerintah mengembangkan pengalaman mereka agar cara tersebut dapat berhasil. Inovasi yang dimaksud adalah Indonesia berusaha membuat fitur dan mengembangkan fitur baru sertifikat internasional vaksinasi Covid-19 di PeduliLindungi sesuai standar WHO atau sama dengan standar sistem DIVOC agar dapat diterima dan diakui oleh pihak dari Komisi Eropa untuk bergabung dalam kebijakan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid. Dari evolusi inovasi pemerintah Indonesia ini mereka berhasil mendapatkan tujuan yang diinginkan mendapat pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19 atau *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726* yang secara signifikan juga dapat membantu pemulihan ekonomi paska Covid-19 melalui peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia yang meningkat.

Tujuan dari penerapan aplikasi PeduliLindungi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah

⁹⁵ Kementerian Luar Negeri RI, wawancara penulis secara online, 7 Oktober 2022

- a. Pastikan untuk mempraktikkan social distancing (hindari keramaian) dan bersihkan tempat umum
 - b. Mencari seseorang yang melaporkan/terinfeksi Covid-19
 - c. versus Pelacakan pola distribusi komunitas melalui fungsi GPS dan Bluetooth
 - d. Impor/impur data untuk menyiapkan kebijakan yang akan diterapkan selanjutnya
 - e. Konsultasi media dan layanan medis melalui fungsi Teledokter
2. Pengelola fasilitas publik

Memastikan masyarakat yang berada di fasilitas publik dalam keadaan sehat dan terbebas dari Covid-19
 3. Masyarakat
 - a. Menginformasikan tentang zonasi penyebaran Covid-19
 - b. Memastikan fasilitas umum aman dari penyebaran Covid-19

Berdasarkan tabel di atas, penerapan aplikasi PeduliLindungi ditujukan untuk melindungi masyarakat yang mengakses fasilitas umum agar kegiatan yang dilakukan aman dan dapat mencegah penyebaran Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi tidak dimaksudkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas umum, namun untuk memastikan bahwa yang berhak dalam hal ini adalah anggota masyarakat yang tidak terinfeksi Covid-19 dan yang telah divaksinasi Covid-19 adalah mereka yang berhak masuk dan keluar fasilitas umum tersebut, dan orang yang terinfeksi Covid-19 atau belum berpartisipasi dalam vaksin Covid-19 tidak diperbolehkan masuk dan

keluar fasilitas karena potensi risikonya. paparan Covid-19, maka kebijakan PeduliLindungi bertujuan untuk melindungi masyarakat di ruang publik.

Proses screening masyarakat yang akan menggunakan fasilitas publik akan mengurangi kemungkinan penularan Covid-19 di ruang publik. Di sisi lain, proses penyaringan masyarakat yang mengakses fasilitas publik melalui aplikasi PeduliLindungi juga dapat membawa manfaat lain seperti membangkitkan produktivitas ekonomi masyarakat di ruang publik seperti pusat perbelanjaan sekaligus menerapkan protokol kesehatan, sehingga diharapkan mampu untuk menghasilkan manfaat yang memiliki dampak eksponensial pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁹⁶

E. Perlindungan pada Data Pengguna Aplikasi PeduliLindungi dan EUDCC

Di Indonesia maupun Uni Eropa memiliki kesamaan dalam perlindungan data pribadi. Pada aplikasi PeduliLindungi perlindungan data pribadi dan aspek keamanan sistem menjadi prioritas. Menurut Direktur KSIA Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI, “Baik Indonesia maupun Uni Eropa sama-sama menjunjung tinggi perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi salah satu perhatian bagi kerja sama saling pengakuan sertifikat vaksin COVID-19 serta interoperabilitas aplikasinya.”⁹⁷ Dilansir dari *European Union External Action* setelah negara terhubung ke sistem EUDCC maka sertifikat tersebut dianggap valid di UE. Negara non UE yang telah bergabung

⁹⁶ Dian Herdiana, Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.6 Nopember 2021, 1685.

⁹⁷ Ibid

dengan sistem secara otomatis harus mematuhi standar teknis dan prinsip keamanan serta perlindungan data.⁹⁸

Alasan mengapa permasalahan perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu perhatian dari kerjasama pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19 karena Uni Eropa menganggap perlindungan data pengguna perlu dilakukan sesuai dengan *Regulation (EU) 2021/953* pada article (10) point (3) dan (4)⁹⁹, bahwa:

(3). The personal data included in the certificates referred to in Article 3(1) shall be processed by the competent authorities of the Member State of destination or transit, or by the cross-border passenger transport services operators required by national law to implement certain public health measures during the COVID-19 pandemic, only to verify and confirm the holder's vaccination, test result or recovery. To that end, the personal data shall be limited to what is strictly necessary. The personal data accessed pursuant to this paragraph shall not be retained.

(4). The personal data processed for the purpose of issuing the certificates referred to in Article 3(1), including the issuance of a new certificate, shall not be retained by the issuer longer than is strictly necessary for its purpose and in no case longer than the period for which the certificates may be used to exercise the right to free movement.

Fitur yang berada di PeduliLindungi beroperasi dalam kerangka kerja data *Ownership* dan *Stewardship*. Dalam transaksi pertukaran data seperti fitur *check in* di area publik, pengapusan history penggunaan, dan akes pada perangkat persetujuan (*consent*) menjadi layer. Selain itu PeduliLindungi semakin berkembang yang berpacu dan dijadikan referensi atas praktik pemanfaatan data serta teknologi dalam protokol kesehatan Covid-19 yang terdapat pada kesepakatan global *Joint Statement WHO on*

⁹⁸ "Non-EU countries welcome to join the EU Digital COVID certificate system," *European Union External Action*

⁹⁹ "Regulation (EU) 2021/953 Of The European Parliament And Of The Council," *Official Journal of the European Union L-211/ 11*, June 15, 2021, diakses pada 28 November 2022

Data Protection and Privacy in the Covid-19 Response pada tahun 2020. Tidak hanya itu komitmen untuk menjaga privasi data pribadi dilakukan dengan kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan pengamanan aplikasi, pengamanan data terenkripsi, dan infrastruktur pusat data. Aplikasi PeduliLindungi melalui proses penilaian aspek teknis dan legalitas untuk pendaftaran untuk penempatan data dan penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu PeduliLindungi adalah sistem elektronik yang terpercaya, tanggung jawab, aman, dan dapat diandalkan. Bagian data dan informasi pribadi akan dihapus oleh server minimal 5 tahun sejak aplikasi sudah tidak beroperasi, untuk pengguna fitur validasi sertifikat vaksin non-Indonesia melalui PeduliLindungi data yang tersubmit akan langsung dihapus otomatis setelah validasi.¹⁰⁰

Sementara itu dalam sistem EUDCC sertifikat mencakup sekumpulan informasi terbatas yang diperlukan seperti tanggal lahir, nama, tanggal penerbitan, informasi tentang tes/pemulihan/vaksin, dan identifikasi unik. Saat pengecekan sertifikat vaksin dinegara lain data-data ini tidak disimpan. Hanya untuk validitas keaslian sertifikat siapa yang melakukan verifikasi dan tanda tangan. Data kesehatan tetap berada di negara anggota yang menerbitkan sertifikat Digital COVID UE.¹⁰¹

¹⁰⁰ “Daftar Pertanyaan Implementasi Interoperabilitas Sertifikat Vaksinasi Covid-19 RI-UE,” *Kementerian Luar Negeri Ri*, 5 Agustus 2022, diakses pada 29 November 2022, <https://kemlu.go.id/madrid/id/news/20246/daftar-pertanyaan-implementasi-interoperabilitas-sertifikat-vaksinasi-covid-19-ri-ue>

¹⁰¹ “What data does the EU Digital COVID Certificate include? Is the data safe?,” *An Official Website EU Website*, diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

Dari penjelasan mengenai komitmen Indonesia untuk terus mengembangkan fitur agar data dan privasi pengguna terlindungi, sesuai dengan indikator *leaning* menurut Geoff Mulgan dimana ide atau inovasi akan terus berkembang sesuai dengan eksplisit dan formal saat praktik dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Indonesia (Kementerian Kesehatan RI) selaku otoritas pemegang aplikasi PeduliLindungi terus melakukan analisis kelemahan-kelamahan yang terjadi pada perlindungan data pengguna aplikasi agar penambahan fitur baru sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan pertanyaan dari pihak Kementerian Luar Negeri bahwa¹⁰²:

...Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam *Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the Covid-19 Response* tahun 2020, yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan Covid-19. Data Pribadi akan dihapus dari server Aplikasi minimal 5 (lima) tahun sejak Aplikasi tidak beroperasi.

Pada akhirnya melihat usaha Indonesia untuk terus mengembangkan fitur di aplikasi PeduliLindungi khususnya dalam perlindungan data pengguna, maka Uni Eropa menerima Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam Non-UE dalam pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19.

F. Kementerian Luar Negeri RI sebagai Koordinator dari Pihak Indonesia

Dari pihak Indonesia ada sinergi yang terbentuk antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI dan *Digital Transformation Office* (DTO).

¹⁰² Nidya Kartikasari, wawancara penulis swcara online, 28 September 2022

Kementerian Luar Negeri RI berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI karena dalam mendapatkan pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi covid-19 oleh Uni Eropa tentunya yang menjadi *focal point* adalah Kementerian Kesehatan RI, seperti yang telah dijelaskan oleh Direktur KSIA Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara dengan penulis, bahwa:

Kementerian Kesehatan RI selaku operator dari aplikasi PeduliLindungi memberikan bantuan dalam bentuk penyesuaian sistem, seperti misalnya, namun tidak terbatas, melakukan verifikasi, mentransfer informasi dalam sertifikat vaksin UE, menyelaraskan ke dalam sistem screening PeduliLindungi, hingga mengintegrasikan data pengguna ke sistem sehingga status vaksinasi dapat terbaca.¹⁰³

Kementerian Luar Negeri RI juga bersinergi dengan DTO karena dalam menangani aplikasi PeduliLindungi secara khusus Kementerian Kesehatan RI membentuk badan yang disebut DTO. Kantor DTO ini berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/3605/2021 pada bulan Maret 2021. DTO memiliki misi untuk mengubah pelayanan kesehatan di Indonesia berdasarkan data dan teknologi.¹⁰⁴ DTO memiliki peran dalam pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid PeduliLindungi dengan EUDCC, dikutip dari jawaban pihak Kementerian Luar Negeri melalui wawancara dengan penulis, “Kemlu bekerja sama dengan Digital Transformation Office (DTO) Kemkes dan KBRI Brussel telah melakukan peninjauan hingga pengawalan implementasi saling pengakuan antara

¹⁰³ Nidya Kartikasari, wawancara penulis secara online, 28 September 2022

¹⁰⁴ The Future of Health in Indonesia,” *Digital Transformation Office*, diakses pada 1 Desember 2022, <https://dto.kemkes.go.id/>

Pedulilindungi dan EU DCC dengan Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, dan Komisi Uni Eropa.”¹⁰⁵

Peran Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator dari perwakilan Indonesia (Kementerian Kesehatan RI dan DTO) sesuai dengan fungsi dari Kementerian Luar Negeri yang terdapat pada pasal 5 poin d yang berbunyi:

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.¹⁰⁶

Jika Kementerian Luar Negeri RI sebagai koordinator berarti melakukan fungsi atau kewajiban yang tertuang dalam peraturan instansi terkait. Maka dapat dikatakan Kementerian Luar RI melakukan peran, hal ini berdasarkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang telah menjalankan suatu peranan.

G. Kementerian Luar Negeri RI sebagai Fasilitator

Kementerian Luar Negeri RI yang berperan sebagai fasilitator melalui KBRI Brussel dan sebagai jembatan untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi Eropa. Pernyataan ini didukung oleh Nidya Kartikasari selaku perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, dikatakan bahwa:

Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan KBRI Brussel dalam hal ini menjadi **fasilitator** pembahasan pengakuan baik di tingkat teknik maupun di tingkat legal antara perwakilan dari pemerintahan Indonesia yaitu tim pengelola Pedulilindungi, Kementerian Kesehatan RI, dan Komisi Eropa. Kementerian Luar Negeri RI mengambil peran untuk menjadi **jembatan** melalui serangkaian

¹⁰⁵ Kementerian Luar Negeri RI, wawancara penulis secara online, 7 Oktober 2022

¹⁰⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Pasal 5, poin d

pertemuan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Komisi Eropa maupun internal Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses *interoperability* PeduliLindungi-EUDCC.¹⁰⁷

Sebelum terbentuk *Commission Implementing Decision (EU) 2022/726*, Keementrian Luar Negeri RI telah melakukan pendekatan dengan Uni Eropa. Sekretariat TPPE Lintang Paramitasari Parnohadiningrat memaparkan bahwa telah melakukan kontak dengan Uni Eropa selama dua bulan, dalam prosesnya tidak lagi hanya pengakuan bersama atau *mutually recognizing* tetapi telah masuk pada proses *interoperability* dimana sertifikat vaksinasi dapat dibaca oleh sistem.¹⁰⁸

Interoperabilitas sendiri adalah suatu aplikasi saling berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui lewat berbagai macam jalur komunikasi dalam proses ini terjadi pertukaran data antar sistem dari platform yang berbeda.¹⁰⁹ Saat ini bentuk implementasi dari interoperabilitas PeduliLindungi dengan EUDCC yaitu melalui scan fitur barcode sertifikat vaksin Uni Eropa dapat diakses di aplikasi PeduliLindungi. Implementasi dari interoperabilitas ini dirasakan memberikan kemudahan bagi setiap individu yang melakukan perjalanan lintas negara Indonesia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁷ Nidya Kartikasari, wawancara penulis secara online, 28 September 2022

¹⁰⁸ Fajar Nugraha, "Indonesia Akan Kawinkan Sistem Sertifikasi Vaksin dengan Uni Eropa," *Medcom.id*, 7 April 2022, diakses pada 8 Januari 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.medcom.id/amp/ybDXApPb-indonesia-akan-kawinkan-sistem-sertifikasi-vaksin-dengan-uni-eropa>

¹⁰⁹ Definisi Interoperabilitas [Interoperability], *BPS FAQSP2020*, diakses pada 30 November 2022, <https://qasp2020.bps.go.id/posts/84f97df21abb4947afd5e271bb586f04/interoperability/definisi-interoperabilitas>

dengan Uni Eropa namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di negara tersebut.¹¹⁰

Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan perwakilan RI di luar negeri juga telah memfasilitasi beberapa pertemuan dengan pihak Uni Eropa. Hal ini telah dipaparkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri RI kepada peneliti bahwa, “Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah memfasilitasi berbagai pertemuan antara Kemkes dengan pihak EU DCC hingga memastikan tujuan-tujuan kerja sama dapat dicapai, yaitu saling pengakuan sertifikat vaksinasi.”¹¹¹

Kementerian Luar Negeri RI sebagai fasilitator dalam pengakuan kesetaraan vaksinasi Covid-19 oleh Uni Eropa ini sesuai dengan salah satu pembagian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran partisipatif, memberikan sumbangan yang berguna bagi kelompok. Kontribusi yang diberikan seperti yang telah dijelaskan yaitu mengadakan pertemuan antara Kementerian Kesehatan dengan pihak EUDCC hingga melakukan pendekatan kepada pihak Uni Eropa untuk percepatan proses interoperabilitas. Kedudukan Kementerian Luar Negeri RI sebagai fasilitator yang aktif mendorong berbagai pihak dari Indonesia untuk meningkatkan hubungan baik dengan pihak luar negeri sesuai dengan fungsi dari Kementerian Luar Negeri RI yang terdapat di pasal 5 yang berbunyi bagian a dan b sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri

¹¹⁰ “Daftar Pertanyaan Implementasi Interoperabilitas Sertifikat Vaksinasi Covid-19 RI-UE,” *Kementerian Luar Negeri RI*

¹¹¹ Kementerian Luar Negeri RI, wawancara penulis secara online, 7 Oktober 2022

- b. Pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹²

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa Kementerian Luar Negeri sebagai fasilitator telah memenuhi salah satu fungsi yang ditetapkan dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri”. Maka dari itu Kementerian Luar Negeri telah melakukan perannya sesuai dengan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang telah menjalankan suatu peranan. Peran Kementerian Luar Negeri RI sebagai fasilitator sejalan dengan dimensi peran menurut Arimbi, Horoepoetri, dan Santosa yaitu peran sebagai alat komunikasi dimana Kementerian Luar Negeri dapat dikatakan sebagai instrumen agar Indonesia mendapat informasi apa saja yang harus dilakukan dan dipenuhi dari pihak Uni Eropa melalui pertemuan dan pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Pasal 5, poin a dan b.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2022 “Diplomasi Kesehatan” menjadi salah satu prioritas Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka pembentukan saling pengakuan atau mutual recognition agreement atau MRA atas sertifikat vaksinasi dengan sejumlah negara mitra salah satunya adalah Uni Eropa. Pengakuan kesetaraan sertifikat vaksinasi Covid-19 antara Indonesia dan Uni Eropa menghasilkan sebuah Commission Implementing Decision (EU) 2022/726 yang diresmikan pada tanggal 11 Mei 2022. Kesetaraan memungkinkan untuk validitas, verifikasi keaslian sertifikat vaksinasi Covid-19 yang dimiliki pengguna non-UE dan integritas sistem.

Kementerian Luar Negeri RI adalah salah satu lembaga dari pihak Indonesia yang memiliki peran dalam pencapaian kesetaraan sertifikat vaksin Covid-19 antara Indonesia dengan Uni Eropa. Adapun peran dari Kementerian Luar Negeri RI, antara lain:

1. Kementerian Luar Negeri RI sebagai Koordinator dari Pihak Indonesia, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan DTO selaku pihak yang memahami aplikasi PeduliLindungi secara teknis
2. Kementerian Luar Negeri RI sebagai Fasilitator, mengadakan pertemuan dan menjembatani pihak dari Indonesia untuk bertemu dengan Uni Eropa agar terjadi proses interoperabilitas sistem EUDCC dengan aplikasi PeduliLindungi.

B. Saran

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu penulis membuka kritik dan saran yang bersifat membangun kepada berbagai pihak. Penulis juga memberikan beberapa saran kepada pemerintah Indonesia selaku aktor dalam mendapatkan *Commission Implementing Decision 2022/726* tentang kesetaraan sertifikat vaksin covid-19 oleh Uni Eropa. Pertama kepada Kementerian Luar Negeri diharapkan lebih intens dalam mengupayakan perbaikan-perbaikan pada kesalahan yang mungkin terjadi saat keberlangsungan pengakuan sertifikat vaksin Covid-19 antara Indonesia dan Uni Eropa, pada ranah ini Kementerian Luar Negeri dapat menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara pihak Indonesia dengan Uni Eropa. Kedua kepada Kementerian Kesehatan RI, penulis berharap untuk kedepannya pihak dari Kementerian Kesehatan RI dapat lebih bekerjasama dalam proses pengambilan data hal ini dikarenakan sumber data dari Kementerian Kesehatan RI berperan penting khususnya terkait dengan aplikasi PeduliLindungi baik prosedur maupun teknis. Ketiga kepada DTO penulis juga berharap pihak DTO dapat lebih bekerjasama kedepannya dalam masalah pemberian data kepada peneliti selanjutnya karena implementasi aplikasi PeduliLindungi lebih dipahami oleh DTO. Terakhir kepada Indonesia lebih menyusun strategi yang proaktif, progresif, dan bersinergi secara menyeluruh antar pihak dari dalam Indonesia, kerjasama dalam pengakuan kesetaraan vaksin Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herdiana, Dian. “Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM.” *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.6 Nopember 2021

Horoepoetri, dan Achmad Santosa, Arimbi. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi, 2003.

Moelang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rosda Karya, 1994

Mas’oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta:PT. Ikrar Mandiriabadi, 1990

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. USA: SAGE Publication, Inc., 2014.

R.Terry, George. *Azas-azas Management*. Bandung: Alumni, 1986

Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.2002

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Sugiyon. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfa Beta, 2010

Jurnal dan Skripsi

Afiana, I. R. Yunita, L. D. Oktaviana, and Us. Hasanah. “Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19.” *Jurnal Pengabd. Mitra Masyarakat*. Vol. 2, No. 2, Th 2020

Amelia Putri, Syafrina.” *Diplomasi Kesehatan Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Vaksin Covid-19.* Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2022
<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/74317>

- Cattleya Limantara, Anastasia, Yuliyanti Seva, Elvira Gosal, Hanna Anindita Paramastuti, Ignatius Bintang Kriswicaksana, dan Zulaekha Amalia.” Tujuan Diplomasi Kesehatan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus dalam Diplomasi Bilateral Indonesia dengan Fiji dan Kepulauan Solomon,” *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi* (2010). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5194>
- Fastyaningsih, Aridyah dan Dian Priyantika, Fitta Tri Widyastuti, Kismartini, “Keberhasilan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Kebijakan Percepatan Vaksinasi dan Akses Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. Vol 6, Nomor 2, Oktober 2021
- Häkli, Jouni.” COVID-19 Certificates as a New Form of Mobility Control.” *European Journal of Risk Regulation* 12 Issue 2 (2021): 362-369. <https://doi.org/10.1017/err.2021.21>
- Herdiana, Dian. “Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM.” *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No.6 Nopember 2021, 1685.
- Kholil, Ishak dan Laela Kurniawatih, Nicodias Palasara, Ridan Nurfalah, Ani Oktarini Sari. “Implementasi Aplikasi PeduliLindungi Untuk Menunjang Aktifitas Sosial Kemasyarakatan”. *Jurnal Abdimas*. Vol 1 No. 1 Februari 2022
- Montanari Vergallo, Gianluca, Simona Zaami, Pierto Brunetti, Enrico Marinelli, Francesca Negro, Alessandro del Rio. “Does the EU COVID Digital Certificate Strike a Reasonable Balance between Mobility Needs and Public Health?.” *Medicina* 57 (10), 1077 (2021): 1-9. <https://doi.org/10.3390/medicina57101077>
- Sarmigi. “Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Al – Dzahab* (2020) Vol. 1
- Stanimirovic, Dalibor dan Lucija Tepej Jovic,” Introduction of the EU Digital COVID Certificate in Slovenia: Technological and Process Aspects,” *Informatics and Technology in Clinical Care and Public Health* 289 (2022): 118-122, <https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI210873>

Media Online

- An Official EU Website. “Can non-EU citizens travel to the EU?”. Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate
- An Official EU Website. “How does the certificate work?.” Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#new-rules-on-the-validity-of-eu-digital-covid-certificate-and-the-coordination-of-safe-travel-in-the
- An Official EU Website. “New rules on the validity of EU Digital COVID Certificate and the coordination of safe travel in the EU.” Diakses pada 29 November 2022, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#new-rules-on-the-validity-of-eu-digital-covid-certificate-and-the-coordination-of-safe-travel-in-the
- An Official EU Website. “Potential use of certificates for access to facilities.” Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#how-does-it-help-free-movement
- An Official EU Website. “Recognition by the EU of COVID certificates issued by third (non-EU) countries”. Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#can-non-eu-citizens-travel-to-the-eu
- An Official EU Website. “Validity of the certificates.” Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate
- An official EU Website. “What is the EU Digital COVID Certificate?.” Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate

- An Official Website EU Website. “What data does the EU Digital COVID Certificate include? Is the data safe?.” Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
- An Official EU Website. “Who can get the EU Digital COVID certificate?.” Diakses pada 29 November 2022. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#what-is-the-eu-digital-covid-certificate
- Apriandi. “Kemlu Tingkatkan Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Negara Mitra.” *Koransn.com*. April 7, 2022. Diakses pada 7 Januari 2023, <https://koransn.com/kemlu-tingkatkan-pengakuan-sertifikat-vaksin-covid-19-di-negara-mitra/>
- BPS. Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan). Diakses pada 30 November 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/16/1470/1/kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html>
- BPS FAQSP2020. Definisi Interoperabilitas [Interoperability]. Diakses pada 30 November 2022. <https://qasp2020.bps.go.id/posts/84f97df21abb4947afd5e271bb586f04/interoperability/definisi-interoperabilitas>
- Brit Cham Indonesia. “Europe Recognizes PeduliLindungi App; Valid in 27 Countries.” May 18, 2022. Diakses pada 5 Desember 2022. <https://britcham.or.id/europe-recognizes-pedulilindungi-app-valid-in-27-countries/>
- Brown, Hannah dan Euronews Travel.” UPDATED: Where can I travel in Europe? A list of COVID entry rules for every European country.” *Euronews Travel*, October 28, 2022. Dakses pada 1 Desember 2022. <https://www.google.com/amp/www.euronews.com/travel/amp/2022/10/21/wh-at-s-the-latest-on-european-travel-restrictions>
- CNN Indonesia. “Uni Eropa Sahkan PeduliLindungi, Bisa Dipakai di 27 Negara.” May 12, 2022. Diakses pada 7 Januari 2023. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/internasional/202205>

[12142316-134-795961/uni-eropa-sahkan-pedulilindungi-bisa-dipakai-di-27-negara/amp](https://www.12142316-134-795961/uni-eropa-sahkan-pedulilindungi-bisa-dipakai-di-27-negara/amp)

Covid Passport. “EU COVID Certificate: the global vaccine passport” Diakses pada 5 Desember 2022. <https://www.covidpasscertificate.com/europe-digital-green-pass/>

CXO Media. “PeduliLindungi Bisa Dipakai di ASEAN & 27 Negara Eropa.” May 18, 2022. Diakses pada 30 November 2022. <https://www.cxomedia.id/art-and-culture/20220518161146-24-174897/pedulilindungi-bisa-dipakai-di-asean-27-negara-eropa>

Digital Transformation Office. “The Future of Health in Indonesia.” Diakses pada 1 Desember 2022, <https://dto.kemkes.go.id/>

DIVOC. “Introduction to Divoc.” Diakses pada 28 November 2022. <https://divoc.digit.org/>

Europe Daily News. “EU COVID-19 Response.” May 11, 2022. Diakses pada 28 November 2022. <https://www.mayerbrown.com/en/perspectivesevents/publications/2022/05/europe-daily-news/europe-daily-news-may1122>

Evandio, Akbar. “Indonesia-Uni Eropa Akui Sertifikat Vaksin, Kemenkes: Tetap Harus Unduh PeduliLindungi.” *Bisnis.com*. May 12, 2022. Diakses pada 30 November 2022, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20220512/15/1532633/indonesia-uni-eropa-akui-sertifikat-vaksin-kemenkes-tetap-harus-unduh-pedulilindungi>

EU Monitor. “Implementing Decision.” Diakses pada 28 November 2022. <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkh7chz09fy8>

European Union External Action. “Non-EU countries welcome to join the EU Digital COVID certificate system.” October 27, 2021. https://www.eeas.europa.eu/eeas/non-eu-countries-welcome-join-eu-digital-covid-certificate-system_en

FKM UNAIR. “Mengenal Vaksin Corona Vac.” Diakses pada 30 November 2022. <https://fkm.unair.ac.id/5969/>

- Indonesia.Go.id. “Dari Indonesia untuk Dunia, Diplomasi Keadilan Vaksin hingga Pemulihan Ekonomi.” Januari 6, 2022. Diakses pada 7 Januari 2023. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3590/dari-indonesia-untuk-dunia-diplomasi-keadilan-vaksin-hingga-pemulihan-ekonomi>
- Iskandar.” Aplikasi PeduliLindungi Sudah Ada di Play Store, Yuk Instal untuk Cegah Covid-19.” *Liputan6*. Maret 30, 2020. Diakses pada 6 Desember 2022. <https://m.liputan6.com/teknoread/4214828/aplikasi-pedulilindungi-sudah-ada-di-play-store-yuk-instal-untuk-cegah-covid-19>
- KBBI. “Pengertian Peran.” Diakses pada 7 Januari 2023. <https://kbbi.web.id/peran.html>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia. “Uni Eropa Masukkan Indonesia dalam Daftar Negara yang Bisa Kunjungi Uni Eropa.” 18 November 2021. Diakses pada 30 November 2022. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/17522/uni-eropa-masukkan-indonesia-dalam-daftar-negara-yang-bisa-kunjungi-uni-eropa>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia. “Uni Eropa.” Diakses pada 1 Desember 2022, <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>
- Kementerian Luar Negeri RI. “Daftar Pertanyaan Implementasi Interoperabilitas Sertifikat Vaksinasi Covid-19 RI-UE.” 5 Agustus 2022. Diakses pada 29 November 2022. <https://kemlu.go.id/madrid/id/news/20246/daftar-pertanyaan-implementasi-interoperabilitas-sertifikat-vaksinasi-covid-19-ri-ue>
- Kementerian Luar Negeri RI. “Pemberlakukan Interoperabilitas Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Indonesia dan Uni Eropa.” May 12, 2022. Diakses pada 29 November 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3593/berita/pemberlakukan-interoperabilitas-sertifikat-vaksinasi-covid-19-indonesia-dan-uni-eropa>
- Kominfo.” PeduliLindungi Dapat Digunakan Pemegang Kartu Vaksin Luar Negeri.” September 14 2021. Diakses 03 Juni 2022, [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominformedia.go.id\)](https://kominformedia.go.id/berita/2021/09/14/pedulilindungi-dapat-digunakan-pemegang-kartu-vaksin-luar-negeri)
- Nadira, Fergi. “Upaya Pemerintah Saling Akui Sertifikat Vaksin dengan Negara Lain.” *Republika.co.id*. April 7, 2022. Diakses pada 7 Januari 2023. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r9yq4m370>

- Natalia, Michelle. " Lewat Seamless Travelling, Indonesia Diyakini Jadi Pelopor Inovasi di Ajang G20." *IDX Channel.com*. February 15, 2022. Diakses pada 30 November 2022. <https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/lewat-seamless-travelling-indonesia-diyakini-jadi-pelopor-inovasi-di-ajang-g20>
- Nugraha, Fajar."Indonesia Akan Kawinkan Sistem Sertifikasi Vaksin dengan Uni Eropa." *Medcom.id*. 7 April 2022. Diakses pada 8 Januari 2023. <https://www.google.com/amp/s/www.medcom.id/amp/ybDXApPb-indonesia-akan-kawinkan-sistem-sertifikasi-vaksin-dengan-uni-eropa>
- R. Aditya 30 Juli 2022. "PeduliLindungi, Situs Download Sertifikat Vaksin Covid-19." *Suara.com*. 2021. [Online]. Available: <https://www.suara.com/news/2021/07/16/202143/pedulilindungi-situs-downloadsertifikat-vaksin-covid-19?page=all>
- Rifka Sitoresmi, Ayu." Sertifikat Vaksin Internasional Sudah Ada di PeduliLindungi, Ini Cara Cek dan Downloadnya." February 06, 2022. Diakses pada 6 Desember 2022. <https://m.liputan6.com/hot/read/4879428/sertifikat-vaksin-internasional-sudah-ada-di-pedulilindungi-ini-cara-cek-dan-downloadnya>
- Rokom. "Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional sesuai Standar WHO." *SehatNegeriku*. Januari 28, 2022. Diakses pada 6 Desember 2022, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220128/4639226/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-sesuai-standar-who/>
- Samaria Simangunsong ,Wasti."Resmi! Aplikasi PeduliLindungi Bisa Dipakai di 27 Negara Uni Eropa." *Kompas.com*. Diakses pada 30 November 2022. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/2022/05/12/181842627/resmi-aplikasi-pedulilindungi-bisa-dipakai-di-27-negara-uni-eropa>
- Satu, Berita dan Jayanty Nada Shofa." Indonesia Starts CoronaVac Phase 3 Clinical Trials." *Jakarta Globe*. 11 August, 2020. Diakses pada 30 November 2022. <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-starts-coronavac-phase-3-clinical-trials>
- Schengenvisa News. "EU COVID Certificate: Commission Recognizes as Equal Vaccination Certificates Issued by 2 More Third Countries." 5 April 2022. Diakses pada 5 Desember 2022. <https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-covid-certificate-commission-recognizes-as-equal-vaccination-certificates-issued-by-2-more-third-countries/>

- Sekarwati, Suci.” PeduliLindungi Diakui Eropa, Duta Besar Andri: Ini Bukti Penguatan Kerja Sama.” *Tempo.co*. May 13, 2022. Diakses 10 Juli 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1591138/pedulilindungi-diakui-eropa-duta-besar-andri-ini-bukti-penguatan-kerja-sama>
- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Didukung Program Penguatan Digital.” February 15, 2022. Diakses 30 November 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3718/upaya-pemulihan-sektor-pariwisata-didukung-program-penguatan-digital>
- Stay Featured. “DIVOC-Landmark 2 billion COVID-19 certificates issued across 5 countries.” Diakses pada 6 Desember 2022. <https://www.stayfeatured.com/post/divoc-landmark-2-billion-covid-19-certificates-issued-across-5-countries>
- Stewart, Conor. “Number of new coronavirus (COVID-19) cases in Europe 2022.” *Statista*. October 17, 2022. Diakses pada 1 Desember 2022. <https://www.statista.com/statistics/1102209/coronavirus-cases-development-europe/>
- Sthepans, Daisy.” What is the EU Digital Covid Certificate and can I get one?.” *lbc.co.uk*. July 2, 2021. Diakses pada 1 Desember 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.lbc.co.uk/news/explained/what-is-the-eu-digital-covid-certificate-and-can-i-get-one/>
- Susanto, Rahka.” UE Akui Paspor Vaksin 3 Negara ASEAN, Bagaimana Indonesia?”, *DW*, Diakses pada 01 November 2022. <https://www.dw.com/id/uni-eropa-hanya-akui-paspor-vaksin-covid-dari-tiga-negara-asean/a-61747617>, pada 01 November 2022. ..
- The Times of India.” Covid Travel certificate in EU: All you need to know.” June 2, 2021, diakses pada 5 Desember 2022. https://www.google.com/amp/s/m.timesofindia.com/world/europe/covid-travel-certificate-in-eu-all-you-need-to-know/amp_articles/83168478.cms
- UNPAD. “Recognition Arrangement, Tantangan Sekaligus Peluang Bagi Indonesia.” Maret 17, 2016. Diakses pada 7 Januari 2022. <https://www.unpad.ac.id/2016/03/mutual-recognition-arrangement-tantangan-sekaligus-peluang-bagi-indonesia/>

Warta Ekonomi.co.id. “Perjalanan Jadi Gampang, Uni Eropa Akui PeduliLindungi karena Pertimbangan Ini.” May 13, 2022. Diakses pada 7 Januari 2023. <https://www.google.com/amp/s/wartaekonomi.co.id/amp/read413721/perjalanan-jadi-gampang-uni-eropa-akui-pedulilindungi-karena-pertimbangan-ini>

Yang, Lucy. “DIVOC – Understanding the Global COVID Certificate Landscape.” *Public Health*. October 31, 2021. Diakses pada 28 November 2022. <https://www.lfph.io/2021/10/13/divoc/>

Regulasi

“Commission Implementing Decision (EU) 2022/726,” Official Journal of the European Union L 134/35, May 11, 2022. Diakses pada 28 November 2022, http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/726/oj

“Regulation (EU) 2021/953 Of The European Parliament And Of The Council.” Official Journal of the European Union L-211/ 11. June 15, 2021. Diakses pada 28 November 2022

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri

Wawancara dan Diskusi

Kementerian Luar Negeri RI pada 7 Oktober 2022 secara online

Kartikasari, Nidya pada 25 Oktober 2022 secara online

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A